

**OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI KUWAIT MELALUI *NOTIFICATION***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

**DINO RAFIDIDTYA PRADANA
NIM. 145010107121002**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI KUWAIT MELALUI *NOTIFICATION***

DINO RAFIDITYA PRADANA

NIM : 145010107121002

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
..... dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.
NIP. 19590320 198601 1 003

Agis Ardiansyah, S.H, LL.M.
NIP. 19840313 200912 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H, M.Hum.
NIP. 19780811 200212 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Juni 2018

Yang menyatakan

Dino Rafiditya Pradana

145010107121002



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan bagi penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

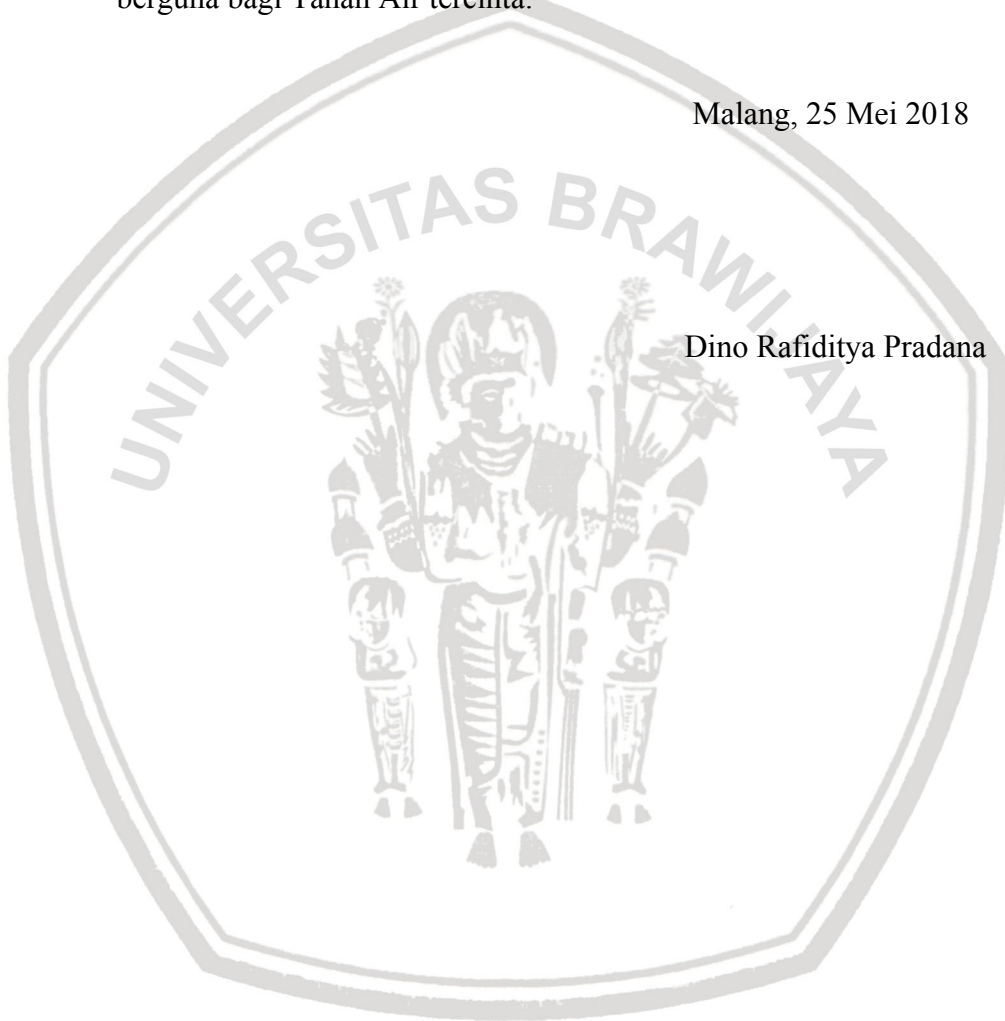
1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Hanif N. Widhiyanti, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
3. Bapak Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Agis Ardiansyah, S.H,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan;
4. Seluruh keluarga besar penulis terutama kedua orang tua saya, Mamah (dr, Henny Herlina Sp.A), Papah (Prima Hedy, S.H., M.kn.) yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan baik secara moril maupun materil, dan menghibur penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi;
5. Keluarga besar Fakultas Hukum 2014, Classic, dan teman-teman Bilstuff serta teman seperjuangan lainnya semasa kuliah;
6. ALSA LC UB & ALSA Indonesia yang telah menjadi rumah kedua penulis selama kuliah terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman berorganisasi yang telah diberikan;
7. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah, Noterdam, Uptown Funk, National Board ALSA Indonesia periode 2017/2018 Waleh Weleh Woloh, , MJ, panitia SEMUNAS XXIV, BBJKav9 terima kasih telah memberi dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
8. Teman-teman penulis Ard hilo, Eiza, Ize, Kimmy, Anshar, Damar, Bateen, Obi, Syafiq, Dion, dan CNJ yang selalu memberikan semangat dari jauh

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, penulis ucapkan terima kasih;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung demi terwujudnya skripsi yang lebih baik. Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam masa perkuliahan dan pembuatan skripsi ini penulis pernah melakukan kesalahan kepada semua baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Tanah Air tercinta.

Malang, 25 Mei 2018

Dino Rafiditya Pradana



RINGKASAN

Dino Rafiditya Pradana, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, **OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KUWAIT MELALUI NOTIFICATION**, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum dan Agis Ardiansyah, S.H,LL.M

Kata kunci: Tenaga kerja, *Notification*, Kuwait

Penulis mengangkat permasalahan optimalisasi upaya perlindungan TKI di Kuwait melalui *notification*. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi negara Kuwait bahwa KBRI di Kuwait tidak mendapatkan notifikasi mengenai adanya kasus hukum yang didapatkan oleh TKI di Kuwait. KBRI Kuwait baru mengetahui adanya kasus hukum yang diterima oleh TKI PRT di Kuwait sesudah adanya putusan tingkat pertama ataupun putusan tingkat akhir. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Notifikasi merupakan hal yang penting dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia dikarenakan hak-hak dari TKI bermasalah di Kuwait akan rentan nantinya. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu urgensi *notification* sebagai salah satu upaya perlindungan TKI di Kuwait dan model optimalisasi upaya perlindungan TKI melalui *notification* di Kuwait. Penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh berupa data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dapat disimpulkan Baik Konvensi Wina 1961, maupun Konvensi Wina 1963, belum menetapkan informasi detail terkait notifikasi, seperti jangka waktu notifikasi setelah adanya penangkapan, sehingga dalam perlaksanaannya hanya didasarkan atas dasar kesepakatan antar negara, sehingga tidak ada hak dan kewajiban para pihak yang rigid. Maka dari itu perlu adanya *notification agreement*. Pembentukan perjanjian ini menjadi penting karena beberapa kasus yang terjadi di Kuwait keseluruhannya tidak ada pemberitahuan kepada KBRI Kuwait sehingga apabila perjanjian ini dibuat upaya perlindungan TKI akan lebih optimal. Model optimalisasi dari notifikasi dapat dilakukan dengan diawali pembuatan perjanjian notifikasi antara Indonesia dan Kuwait, hal ini didasari untuk menanggulangi kekurangan dari pasal 36 Konvensi Wina 1963 yakni notifikasi dapat diberikan kepada pejabat konsular oleh otoritas berwenang negara penerima tanpa adanya penundaaan apabila negara pengirim ataupun TKI yang terkena kasus hukum memintanya terlebih dahulu, maka perlu adanya perjanjian dengan isi dari perjanjian itu mengharuskan otoritas yang berwenang negara Kuwait untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan negara Indonesia dalam waktu tiga hari kerja bahwa ada warga negara Indonesia yang telah ditangkap, ditahan atau ditawan. dan diikuti proses berikutnya sampai kepada proses pemulangan TKI.

SUMMARY

Dino Rafiditya Pradana, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, *OPTIMALIZATION THE PROTECTION OF INDONESIAN MANPOWER IN KUWAIT THROUGH A NOTIFICATION*, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum dan Agis Ardhiansyah, S.H,LL.M

In this thesis, the author raised the optimization of labor protective measures Indonesia in Kuwait through the notification. The theme of the election effected by the presence of problems occurred in the case of Muhammad Zaini Misrin in Saudi Arabia, it happens similar in countries Kuwait, that the Embassy of the Republic of Indonesia in Kuwait do not get notification about the existence of a legal case obtained by labor Indonesia in Kuwait. Embassy of the Republic of Indonesia in Kuwait recently aware of any case law accepted by Indonesian domestic workers in Kuwait after the existence of the verdict of first instance nor the ruling of the end of the level. This is contrary to article 36 of Vienna Convention 1963. This notification is already an urgency or importance in the protection of Indonesia's labor representative in order for diplomats or consuls can move quickly to help labor Indonesia being detained in the country especially in the sender State of Kuwait. Based on the background, this paper raised the issue of how the formula of notification urgency as one of Indonesian labor protection efforts abroad and how the model optimization of labor protection efforts Indonesia through notification in the State of Kuwait to address the above problems, this empirical legal research using methods of juridical sociological approach. The source data are obtained in the form of primary data through interviews and observations as well as secondary data through the study of librarianship that are relevant to the issues examined. Primary data and secondary data obtained were analyzed using a technique the author would analysis using qualitative, descriptive methods. Based on the discussion, then it can be inferred Either: (I) the Vienna Convention of 1961, the Vienna Convention of 1963, or have not set detailed information related notifications, such as the notification period of time after the arrest, so in practice only based on the basis of an agreement between countries, so that there are no rights and obligations of the parties are rigid. Therefore need for notification agreement. the formation of this agreement becomes even more important because some cases happened in Kuwait a whole lack of notification to the Embassy of the Republic of Indonesia in Kuwait so that when this agreement is made the efforts of labor protection Indonesia will be more optimal. notification of the Optimalization Model can be done by starting with the notification agreement between Indonesia and Kuwait, this is based on to tackle the shortcomings of article 36 of Vienna Convention 1963 i.e. notification can be given to acting consuls by the authority of authorized recipient countries without any delay in the country of the sender or the affected

Indonesian labor case law asked him in advance, hence need for agreement with the contents of the notification his Covenant is the authorized State authority require kuwait to give notification to the representative of indonesia within three working days, that there is an Indonesian citizen who had been arrested, detained, or went into captivity and followed the next process is to process the repatriation of Indonesian labor

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Ringkasan	viii
<i>Summary</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Diplomatik	23
1. Pengertian Asas Hukum Diplomatik	23
2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	26
1. Pengertian Tenaga Kerja	26
2. Tenaga Kerja Indonesia Pekerja Rumah Tangga (TKI PRT)	28

3. Hak Tenaga Kerja	29
4. Kewajiban Pekerja	30
5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan Migran di Kuwait	33
1. Sistem Kafala	33
2. <i>Law No. (68/2015) About Domestic Manpower</i>	35
D. Tinjauan Umum Mengenai Perwakilan Diplomatik	40
1. Kedutaan Besar Republik Indonesia	42
2. KBRI Kuwait	43
E. Tinjauan Umum Mengenai Notifikasi	49
1. Definisi dan Dasar Hukum Notifikasi	49
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Populasi dan Sampel	61
G. Teknik Analisis Data	62
H. Definisi Operasional	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64

A. Bagaimana Urgensi <i>Notification</i> Sebagai Salah Satu Upaya	
Perlindungan Tenaga Kerja indonesia Di Kuwait	64
1. Bentuk Tanggung Jawab Negara Atas Warga Negara Indonesia	64
2. Urgensi Notifikasi Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kuwait.....	75
3. Akibat Hukum Dari Adanya Notifikasi	84
4. Fungsi <i>Notification</i> Pada Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri	89
B. Model Optimalisasi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
Melalui <i>Notification</i> di Kuwait	92
1. Perlindungan Secara Preventif atau Edukatif	92
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) ke luar negeri pertama kali terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia yakni oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah jajahan koloni Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pengiriman TKI ke luar negeri dimulai sampai akhir 1960an. Salah satu bentuk pengiriman TKI sektor domestik yakni Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). Bentuk ini mulai populer pada tahun 1970an, dimana bermula di Malaysia dan Arab Saudi dikarenakan pada masa itu bermunculan orang kaya baru di kedua negara tersebut.¹

Pada saat awal 1960 hingga akhir tahun 1960an pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam hal penempatan TKI ke luar negeri, akan tetapi sebagai perseorangan tanpa perlu memerlukan jasa komersial Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut PJTKI) dan/atau agensi asing (mitra usaha), ataupun faktor garis keturunan antara sejumlah warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga pada saat itu pengiriman TKI tidak ada landasan hukum yang mengiringinya. Sementara itu negara tujuannya adalah Malaysia dan Arab

¹BNP2TKI,"Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI", <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI> diakses pada tanggal 20 November 2017 pukul 15:09

Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara. Khususnya Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengelola orang naik haji / umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.²

Seiring dengan berjalannya waktu, pengiriman TKI PRT terus mengalami peningkatan secara pesat bukan hanya ke Arab Saudi dan Malaysia melainkan ke berbagai negara diantaranya pengiriman TKI PRT ke Kuwait pada tahun 1997 dan menjadi bisnis besar yang menghasilkan triliunan rupiah. Walaupun pengiriman TKI PRT menjadi bisnis yang menghasilkan triliunan rupiah, namun meningkat pula permasalahan yang dialami oleh TKI PRT. Kasus-kasus yang merugikan TKI PRT telah terjadi sejak dikirimnya PRT ke luar negeri, antara lain seperti kasus tidak dibayar gaji, pelecehan seksual, kekerasan, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun di sisi lain terdapat juga kasus-kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh PRT antara lain seperti membunuh majikan dan PRT tersebut dijatuhi hukuman mati.³

Di era sebelum reformasi kasus-kasus tersebut tidak pernah diekspos karena sistem politik pemerintahan pada waktu itu sangat dominan dan tidak adanya keterbukaan serta kebebasan terlebih lagi untuk mengkritisi pemerintah Indonesia. Pasca reformasi dengan era keterbukaan informasi serta kebebasan berpendapat, isu atas kasus-kasus TKI tersebut menjadi sangat sensitif dan bahkan menjadi isu politik.

²ibid

³ibid

Fakta bahwa pada umumnya TKI PRT di negara-negara tujuan penempatan tidak mendapatkan kebebasan seperti paspor dipegang oleh majikan, jam kerja dan jenis pekerjaan tidak terbatas serta perlakuan dari pengguna jasa yang semena-mena. Pengiriman TKI PRT ke luar negeri yang dilakukan selama puluhan tahun dalam jumlah besar dan telah memberikan dampak negatif di dalam negeri dengan munculnya berbagai permasalahan sosial.

Selama puluhan tahun diantara ratusan ribu bahkan jutaan TKI PRT yang pergi meninggalkan suami, anak dan keluarganya untuk bekerja di luar negeri telah turut memunculkan permasalahan sosial seperti tingginya tingkat perceraian diantara mereka yang berdampak pula kepada anak-anaknya menjadi terlantar dan tidak jarang diantara anak-anak tersebut berpotensi melakukan tindak kriminal serta permasalahan sosial lainnya.⁴

Sejak dikirimnya TKI PRT di era tahun 1970-an, hingga lahirnya UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, tidak ada peraturan yang jelas dan tegas akan perlindungan TKI dimaksud.⁵ Sementara itu, pihak-pihak yang melakukan bisnis di sektor TKI PRT ini semakin banyak dan melibatkan tidak hanya Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan tetapi juga para pemangku kepentingan seperti anggota DPR, pejabat-pejabat di kementerian terkait dan juga para pejabat-pejabat di daerah serta pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di partai politik yang

⁴ibid

⁵ ibid

secara langsung atau tidak langsung terlibat dan memiliki kepentingan. Banyak ditemukan diantaranya pengiriman TKI PRT ke luar negeri tidak mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur baik oleh undang-undang maupun peraturan Menteri Tenaga Kerja.

Nampaknya kondisi ini kurang disadari secara luas, sebaliknya pengiriman TKI PRT cenderung hanya lebih menonjolkan sisi remitensi dan penyerapan tenaga kerja dengan mengesampingkan dampak sosial yang terjadi. Berbagai masalah dan penyakit sosial yang muncul dari akibat pengiriman TKI PRT ke luar negeri telah sejak lama mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram atas pengiriman TKI PRT ke luar negeri pada tahun 2000 .⁶

Dengan semakin sensitifnya persoalan-persoalan yang muncul atas kasus-kasus TKI PRT di luar negeri dan menjadi isu politik didalam negeri Indonesia, pada tahun 2004 pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Undang-undang tersebut pada hakekatnya dibutuhkan untuk mengatasi masalah TKI PRT di luar negeri dengan memuat ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi TKI PRT secara baik dan dapat dilindungi secara memadai.

Undang-Undang No. 39 tahun 2004 memiliki kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia harus memberi perlindungan bagi warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya

⁶ Fatwa MUI No.7/MUNAS/ VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri.

pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka pada intinya bahwa pemerintah harus memberikan fasilitasi dan perlindungan kepada setiap warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI PRT di luar negeri yang menyangkut hubungan kedua negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI PRT di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 2004 yang berbunyi “Setiap TKI berhak mendapatkan perlindungan hukum”⁷ selama penempatan di luar negeri dan hal ini sejalan dengan nawacita pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk kembali menghadirkan negara yang melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar

⁷Pasal 8 UU No. 39 Tahun 2004, perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 39 Tahun 2004

negeri. Perlindungan hukum kepada TKI termasuk diantaranya adalah jaminan dilaksanakannya hak dan kewajibannya pengguna jasa dan TKI PRT yang dituangkan dalam perjanjian kerja⁸.

Salah satu upaya dari pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI PRT, salah satu caranya adalah moratorium. Artinya, dengan memberhentikan dan melarang penempatan TKI PRT untuk ditempatkan di negara-negara yang disebutkan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah keputusan Menaker ini, atau dengan kata lain biasa disebut moratorium.

Keputusan ini dibuat karena banyaknya permasalahan yang menimpa TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, keputusan ini bermula pula karena sejumlah negara tujuan penempatan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah moratorium (penghentian) pengiriman TKI PRT maka diberlakukanlah moratorium ini dan moratorium tersebut masih berlaku hingga saat ini. Langkah tersebut sangat efektif, dimana kasus-kasus TKI PRT pada tahun 2009 mencapai lebih dari 10.000 menjadi berkurang hingga ratusan saja pada tahun 2017. Moratorium ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 Ayat 1

⁸Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI Di Luar Negeri.

Salah satu upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah telah disepakatinya antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi untuk menyusun suatu sistem baru bagi warga negara yang bekerja di Arab Saudi. Sistem baru itu meliputi mekanisme satu pintu /sistem satu saluran (*one channel system*) penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mekanisme perlindungan 24 jam dan lainnya. Disamping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi.⁹

Dalam hukum internasional berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 huruf B Konvensi Wina 1961 tentang Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik yang berbunyi “Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional” dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perwakilan diplomatik sudah sepatutnya untuk melindungi warga negara Indonesia di negara lain. Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (selanjutnya disebut KBRI) khususnya di Kuwait melakukan

⁹<http://poskotanews.com/2017/10/17/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-baru-penempatan-tki/> diakses pada 9 mei 2018

berbagai macam upaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di Kuwait.¹⁰

Kuwait sebagai salah satu negara paling makmur di dunia merupakan negara tujuan penempatan TKI PRT yang mulai dilakukan secara resmi pada tahun 1997. Sebelumnya, berdasarkan pada catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) di Kuwait diawali dengan masuknya tenaga perawat dan sejumlah *engineer* serta teknisi di bidang perminyakan pada awal dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Kuwait tahun 1968. Jumlah warga negara Indonesia yang berada di Kuwait pertanggal pada 1 Juli 2017 mencapai 7093 jiwa, yang terdiri dari 1413 laki-laki dan 5680 perempuan. Sejak dikirimkannya TKI PRT yang jumlahnya mencapai lebih dari 70 ribu jiwa tercatat sebagai negara tujuan penempatan yang memiliki banyak permasalahan. Sudah banyak terjadi kasus-kasus yang merugikan TKI PRT seperti, kasus tidak dibayarkannya gaji, pelecehan seksual, kekerasan, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di sisi lain terdapat juga kasus-kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh TKI PRT, sehingga terjerat kasus hukum yang menyebabkan pada dipidananya pekerja rumah tangga tersebut.¹¹ Meskipun demikian, terdapat TKI PRT yang dipidana, namun bukan dikarenakan kesalahan yang mereka perbuat sendiri, melainkan karena laporan majikannya.

Hal ini merupakan salah satu cara dari majikan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap TKI PRT, karena pada dasarnya

¹⁰Sumber: KBRI Kuwait

¹¹ ibid

permasalahan tersebut disebabkan dengan berlakunya sistem *kafala* di Kuwait, yang dimana *sistem kafala* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi, mengontrol, mengelola dan mengatur buruh migran di negara-negara teluk. Secara sejarahnya sistem *kafala* memiliki fungsi sebagai suatu mekanisme untuk memberi tempat tinggal bagi orang asing di masyarakat mereka.

Melalui sistem *kafala*, setiap tuan rumah atau majikan atau disebut *kafeel* menjamin setiap orang asing yang berkunjung dan menerima atas perilaku mereka. Sistem *kafala* bermakna bahwa sponsor atau *kafeel* bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan asing dan tamu asing. Dari definisi sistem *kafala* dapat disimpulkan bahwa setiap majikan menjadi sponsor dan penjamin untuk mendapatkan izin kerja TKI PRT tersebut

Sistem *kafala* memiliki kekurangan yakni yang pertama adalah kondisi kerja yang eksploitatif yaitu akibat penyalahgunaan sistem ini pekerja migran menderita seperti, upah tidak dibayar atau bayaran upah kurang, penyitaan paspor, jam kerja melebihi waktu kerja, tidak adanya kebebasan gerak, kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan atau *kafeel*, kekerasan seksual, ditinggalkan karena sang majikan atau *kafeel* karena majikan mengalami kebangkrutan. Yang kedua adalah kondisi kehidupan yang eksploitatif, yaitu PRT hidup di rumah majikan. Walaupun sudah diterapkannya kontrak standar pekerja rumah tangga yang mencakup ketentuan untuk akomodasi yang layak, kontrak standar gagal untuk mendefinisikan apa arti dari akomodasi yang sesuai dan layak. Sistem

kafala memberikan sponsor kebijaksanaan yang lengkap untuk menentukan mana karyawan yang dapat tinggal menetap. Yang ketiga adalah salah satu konsekuensi utama dari perumusan dan pelaksanaan sistem *kafala* yakni kebijakan negara yang eksploitatif yaitu pengembangan hukum dan kebijakan membatasi hak-hak migran. Kebijakan ini berasal dari kontrol atau tanggung jawab mensponsori pekerja.

Pada kasus buruh migran yang melarikan diri (*absconding*) terjadi ketika seorang karyawan meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Melarikan diri adalah sebuah pelanggaran pidana terkemuka penahanan tanpa batas waktu dan deportasi. Sistem memberikan majikan kemampuan untuk memberikan status hukum pekerja dan kemampuan untuk mengambil status itu. Peraturan-peraturan mensyaratkan pengusaha untuk melaporkan pekerja sebagai hilang. Seseorang yang menyembunyikan status melarikan diri menghadapi tuntutan denda signifikan. Setelah pemberitahuan dari hilang pekerja, polisi membatalkannya izin tinggal dan mengajukan agar dilakukan penahanan.

Produk kebijakan dari sistem *kafala* bahwa pekerja tidak memiliki hak hukum untuk meninggalkan kerja bahkan dalam kasus penyalahgunaan. Sehingga jika terjadi permasalahan atau persoalan yang merugikan TKI PRT, seperti tidak dibayarkannya gaji, mendapat perlakuan kasar atau pelecehan seksual dari majikannya, yang kemudian menyebabkan TKI PRT kabur dari rumah majikan dengan dalih bahwa mereka tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan majikannya. Majikan

dari TKI PRT tersebut dengan begitu saja dapat mencabut izin kerjanya, dengan demikian TKI PRT tersebut menjadi ilegal dan lemah secara hukum dan juga majikan dapat menuntut TKI PRT untuk membayar ganti rugi, karena dianggap tidak memenuhi kontrak kerja sesuai perjanjian.

Setiap tahunnya KBRI Kuwait harus menangani ribuan kasus dan menampung TKI PRT yang meminta perlindungan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidaklah mudah mengingat sistem hukum yang berlaku di Kuwait sangat tidak memadai dengan berlakunya sistem *kafala* dimana TKI PRT (*domestic workers*) tidak diatur dalam hukum setempat dan masuk dalam ranah *private*. Hal ini ditambah pula bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak mendapatkan notifikasi oleh pemerintah Kuwait sehingga KBRI baru mengetahui adanya WNI yang menjadi terdakwa setelah adanya vonis dari pengadilan maka dari itu menyebabkan KBRI tidak memberikan perlindungan atau memfasilitasi wni tersebut secara optimal.¹²

Sebagaimana dalam hukum internasional suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara negara lain yang berada di wilayahnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut. Notifikasi tersebut ditujukan agar perwakilan diplomatik mengetahui bahwa warga negaranya mendapat masalah seperti warga negara yang melakukan tindak pidana, mengalami kecelakaan, membutuhkan perwalian, mengalami kematian, dan lain sebagainya, notifikasi yang diberikan harus disampaikan tanpa

¹²Wawancara dengan Staf Fungsi Ketenagakerjaan di Kuwait pada hari Rabu, tanggal 26 July 2017

penundaan waktu. Kewajiban tentang notifikasi resmi tertulis dalam Pasal 36-37 Konvensi Wina 1963

“1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

(a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;

(b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph;

(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended.”¹³

Dari Pasal 36 Konvensi Wina 1963 ini dapat ditafsirkan bahwa pihak berwenang lokal harus menginformasikan apabila ada warga negara asing yang ditahan tanpa adanya penundaan, bahwa hak mereka adalah untuk dapat berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik ataupun konsular dari negara pengirim. Semua permintaan tahanan, pihak berwenang kemudian harus memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim atas penangkapan tanpa penundaan dan diberikannya izin akses kepada perwakilan diplomat maupun konsuler negara dari warga negara

¹³ Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, Pasal 36

itu ditahan. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada konsulat oleh tahanan juga harus diteruskan tanpa adanya penundaan. Konsulat memiliki hak untuk diberitahu apabila ada penahanan tanpa adanya penundaan, agar perwakilan diplomat ataupun konsuler dapat berkomunikasi, berhubungan, dan mengunjungi dengan warga negaranya yang ditahan, perwakilan diplomat atau konsuler juga dapat mengatur perwakilan hukum mereka dan untuk memberikan bantuan hukum yang sesuai dengan persetujuan dari tahanan tersebut. Hak-hak yang telah disebutkan yakni hak untuk notifikasi, akses, dan bantuan tercantum dalam prosedur hukum, dimana pelaksanaannya dimulai ketika pejabat negara penerima menyadari bahwa tahanan adalah warga negara asing ataupun ada kemungkinan bahwa tahanan tersebut merupakan warga negara asing. Pengaturan tersebut dilakukan untuk memastikan semua warga asing yang ditahan memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan pembelaan dan menerima perlakuan yang sama dengan warga asli negara tersebut.

Namun dalam prakteknya hal ini tidak sejalan dengan norma yang ada dimana banyak sekali kasus-kasus hukum di Kuwait yang dimana KBRI Kuwait tidak mendapatkan notifikasi sehingga berdampak pada banyaknya kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan secara optimal. Kasus di Negara Kuwait juga serupa, seperti pada kasus yang baru saja terjadi di Arab Saudi yakni pada bulan Maret 2018 dimana seorang buruh migran Indonesia bernama Muhammad Zaini Misrin asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang dieksekusi mati namun pemerintah Indonesia tidak mendapatkan notifikasi terkait eksekusi Zaini Misrin di Arab Saudi.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa tidak ada notifikasi mengenai eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin. Zaini Misrin merupakan TKI yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi. Dia didakwa membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi dan ditangkap pada 2004, Penangkapan Muhammad Zaini Misrin tidak diketahui perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Baru pada November 2008, dinotifikasi mengenai penangkapannya kepada perwakilan RI usai adanya putusan pengadilan tingkat pertama.

Dari keterangan tertulis yang diterima dari *Migran Care*, disebutkan bahwa Zaini Misrin mendapat tekanan dari aparat Arab Saudi untuk membuat pengakuan perbuatan yang tidak dilakukannya. Muhammad Zaini Misrin dipaksa untuk mengaku membunuh majikannya, kemudian dalam proses peradilan Muhammad Zaini Misrin didampingi penerjemah asal Arab Saudi itu. Namun, penerjemah memaksa Muhammad Zaini Misrin untuk membuat pengakuan palsu.

Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat permohonan agar Muhammad Zaini Misrin dan WNI lain yang terancam hukuman mati agar dapat diampuni. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga melakukan permohonan agar WNI yang terancam hukuman mati dapat diampuni.¹⁴ Namun, permintaan Presiden Joko Widodo tidak ditanggapi. Dan pada

¹⁴ Marcheilla Ariesta "Kemenlu Akui tak ada Notifikasi Eksekusi WNI di Arab Saudi" diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/asia/4ba79Z0K-kemenlu-akui-tak-ada-notifikasi-eksekusi-wni-di-arab-saudi> diakses pada pukul 10 Mei 2018

akhirnya, Muhammad Zaini Misrin dieksekusi mati tanpa adanya notifikasi dari otoritas berwenang Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

Akibatnya kasus Muhammad Zaini Misrin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap akan melanjutkan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, bertepatan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada TKI asal Madura. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebutkan bahwa, keputusan untuk melanjutkan moratorium didasarkan karena berbagai komunikasi dan jalan keluar atas tindakan hukum dan perlindungan kepada TKI di Arab Saudi belum menemukan titik temu. Disamping itu, Kemenaker Hanif Dhakiri akan menahan kelanjutan terkait pembahasan sistem baru yang sudah ditetapkan penyusunannya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi yakni sistem satu saluran (*One Channel System*) untuk pengiriman TKI yang tengah dibahas antar kedua negara, sebelum eksekusi hukuman mati Zaini terjadi.

Permasalahan yang terjadi pada kasus Muhammad Zaini Misrin di Arab Saudi ini terjadi serupa di negara Kuwait bahwa KBRI di Kuwait tidak mendapatkan notifikasi mengenai adanya kasus hukum yang didapatkan oleh TKI di Kuwait. KBRI Kuwait baru mengetahui adanya kasus hukum yang diterima oleh TKI PRT di Kuwait sesudah adanya putusan tingkat pertama ataupun putusan tingkat akhir. Hal ini bertentangan dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 yang sudah dijelaskan di atas, sedangkan dapat ditelaah bahwa contoh kasus yang terjadi di Arab

Saudi, Notifikasi merupakan hal yang menjadi urgensi/penting dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia agar perwakilan diplomat maupun konsular dapat bergerak cepat untuk membantu TKI yang ditahan di negara pengirim terkhusus di Kuwait.

Dikarenakan masih banyaknya kasus di KBRI Kuwait, dimana TKI PRT menerima putusan hukum namun tidak adanya notifikasi dari pemerintah Kuwait kepada perwakilan diplomat Indonesia, yang menyebabkan kurang optimalnya penyelesaian masalah hukum yang diterima oleh TKI PRT di Kuwait yang dilakukan KBRI Kuwait. Maka penulis juga akan meneliti lebih dalam bagaimana model untuk mengoptimalkan perlindungan TKI melalui adanya notifikasi dari pemerintah Kuwait kepada perwakilan diplomat Indonesia di Kuwait.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Nurul Fauziah Said, Fakultas Hukum Universitas Airlangga	<i>Mandatory Consular Notification</i> Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	a. Kedudukan <i>Mandatory Consular Notification</i> dalam hubungan diplomatik antar negara b. Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI melalui <i>Mandatory Consular Notification</i>	Perbedaan dengan skripsi milik Nurul Fauziah Said, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , dalam skripsi ini

					kajiannya membahas <i>Consular Notification</i> secara umum sedangkan penulis membahas <i>Consular Notification</i> secara khusus di negara Kuwait
--	--	--	--	--	--

2.	2016	Ayu Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta	Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima	<p>a. Kewajiban negara penerima mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik asing</p> <p>b. Kewajiban warga negara asing di negara penerima</p> <p>c. Kewajiban negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa</p>	Perbedaan dengan skripsi milik Ayu Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta, dalam skripsi ini membahas bagaimana kewajiban negara penerima terhadap perwakilan diplomatik sedangkan penulis menerangkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan dengan adanya pemberitah
----	------	---	--	--	---

					uan tersebut
--	--	--	--	--	--------------

Dilihat dari unsur pembedanya dari penelitian-penelitian terdahulu yang tertulis diatas, dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji mengenai optimalisasi upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui notifikasi secara lebih khusus yang berada di negara Kuwait. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan judul:

OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KUWAIT MELALUI *NOTIFICATION*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi *Notification* sebagai salah satu upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di Kuwait?
2. Bagaimana model optimalisasi upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui *Notification* di Kuwait?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis urgensi dari *Notification* sebagai salah satu upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
2. Untuk merumuskan model optimalisasi upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui *Notification* di Kuwait

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa. Adapaun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Diplomatik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan solusi dalam meningkatkan perlindungan Warga Negara Indonesia di Kuwait.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum Internasional, khususnya di bidang hukum diplomatik.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

1. Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran untuk pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
2. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
3. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum internasional khususnya hukum diplomatik

E. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai pembahasan bagaimana optimalisasi upaya perlindungan warga negara Indonesia di Kuwait melalui konsular notifikasi.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Diplomatik

1. Pengertian Asas Hukum Diplomatik

Pengertian asas adalah kebenaran dasar yang dapat memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret sehingga seluruh kaidah yang terdapat pada suatu bidang hukum menjadi kesatuan yang tetap utuh.¹⁵ Asas hukum harus dapat dipakai sebagai sumber sekaligus asal yang mengandung kebenaran dasar. Suatu saat hukum diharapkan dapat memberi arah pada penyusunan kaidah hukum yang lebih konkret sehingga kaidah tersebut merupakan jabaran dan asas hukum, sehingga terjadi konsistensi dan mudah diimplementasikan. Suatu asas hukum harus dapat dipakai sebagai sarana rujukan apabila suatu saat terjadi perselisihan dalam penafsiran kaidah hukum. Menurut Masyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Tersirat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 .

¹⁵ Sunaryati Hartono. **Politik Hukum menuju satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 6.

¹⁶ Masyur Effendi, **Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas hukum Diplomatik dalam era ketergatan antar Bangsa Usaha Nasional**, Surabaya, 1993 hlm. 133.

- b. Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara. Hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea II.
- c. Asas penghormatan atas wakil-wakil Negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan Negara masing-masing, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea IV.
- d. Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini ditegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1963 alinea V.
- e. Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1963.
- f. Asas tidak dapat diganggu gugatnya perwakilan dari masing-masing Negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961.
- g. Asas kepercayaan, ini diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961.

Asas hukum diplomatik tersebut berpangkal pada asas hukum romawi, misalnya asas itikad baik (*bonafides*), timbal balik (*resiprositas*), persetujuan antar bangsa harus ditaati (*pacta sunt servanda*), selalu berdasar pada prinsip keadilan (*et alquo et bono*), persetujuan timbal balik (*mutual consent*), hak-hak istimewa (*privailegium*), kekebalan hukum (*immunitet*).

2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 perwakilan diplomatik memiliki fungsi yang terdiri dari:

“1. The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:

- (a) Representing the sending State in the receiving State;*
- (b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- (c) Negotiating with the Government of the receiving State;*
- (d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;*
- (e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations”*

Pasal diatas dapat diartikan bahwa fungsi diplomatik terdiri dari lima fungsi yakni yang pertama adalah *Representation* atau representasi dimana perwakilan diplomatik yang menempati negara lain memiliki fungsi sebagai perantara negara pengirim dan negara penerima. Yang kedua *Protection* atau perlindungan dimana pejabat diplomatik memiliki fungsi untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negara yang berada di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum Internasional, namun dalam fungsi perlindungan ini lebih menekankan pada tanggung jawab negara. Yang ketiga adalah *Negotiation* atau negosiasi, Pejabat diplomatik mengadakan perundingan dengan pemerintah dari negara penerima yang membahas mengenai teknis-teknis antar dua negara. Perundingan tersebut mencakup kerjasama antar dua negara tersebut di bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya,

bidang perdagangan, bidang militer, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang lainnya. Yang keempat adalah *Reporting* atau Laporan yakni perwakilan diplomatik memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan perkembangan di negara penerima seperti perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima. Pejabat diplomatik juga memberikan laporan mengenai hal-hal terkait kinerja di negara penerima. Yang kelima adalah *Promotion* atau peningkatan yakni perwakilan diplomatik meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara diberbagai bidang, seperti bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan

Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di negara penerima dan atau organisasi internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, Tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam undang-undang tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja yang memberikan pengertian Tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya, bahwa pengertian tenaga kerja atau *man power* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan rumah tangga.

Ada berbagai pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah:

Warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan,

kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep.Menakertrans RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

2. Tenaga Kerja Indonesia Pekerja Rumah Tangga (TKI PRT)

TKI PRT adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tempat mereka tinggal yang bersifat

tetap untuk keperluan bekerja di rumah tangga majikannya sebagai pengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan sebagainya.

Menurut BNP2TKI definisi dari sektor kerja TKI di Luar Negeri terbagi atas dua macam yaitu sektor formal dan non-formal. Sektor formal mencakup bidang konstruksi, kesehatan, manufaktur dan sebagainya, sedangkan untuk sektor non-formal adalah sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

3. Hak Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 8 setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri.
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri.
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia ke tempat asal.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

4. Kewajiban Pekerja

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaannya dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

Menurut Djumialdji ada 3 kewajiban pekerja atau buruh, yaitu:

1. Pekerja atau buruh berkewajiban melakukan pekerjaan.
2. Pekerja atau buruh berkewajiban menaati tata tertib perusahaan.
3. Pekerja atau buruh berkewajiban bertindak sebagai pekerja/buruh yang baik.

5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

a. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 ini terdiri dari 8 BAB dan 46 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, Warga Negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

b. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini terdiri dari 18 BAB dan 193 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, landasan asas dan tujuan , kesempatan dan perlakuan yang sama,

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

c. Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No. 39 tahun 2004 ini terdiri dari 16 BAB dan 109 pasal yang mengatur ketentuan umum, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah, hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (Selanjutnya disebut TKI), pelaksana penempatan TKI di luar negeri, tata cara penempatan, perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, pembinaan, pengawasan, Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

d. Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia ke 6), dengan beberapa program yang sudah disusun. Antara lain:

1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas calon TKI
3. Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan system One Roof Services
4. Advokasi dan Pembelaan TKI
5. Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan TKI
6. Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di daerah
7. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi dan debarkasi
8. Peningkatan profesionalitas lembaga Penempatan TKI
9. Fasilitasi kredit untuk Calon TKI
10. Pengelolaan Remitansi TKI

Salah satunya juga adanya pembentukan atase ketenagakerjaan di negara penerima TKI yang memfasilitasi penyediaan bantuan hukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan Migran di Kuwait

1. Sistem Kafala

Sistem Kafala (sistem sponsor) merupakan sistem yang digunakan untuk memantau buruh migran, yang bekerja terutama di sektor konstruksi dan sektor domestik (PRT). Sistem ini digunakan di Lebanon, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman,

Qatar, Arab Saudi, dan UEA.¹⁷ Di dalam sistem kafala ini pekerja harus mempunyai sponsor dalam negeri yang dikunjunginya (biasanya adalah majikan/pihak pemberi kerja), yang akan bertanggungjawab atas visa dan status hukum pekerja migran bersangkutan. Di bawah sistem Kafala, status imigrasi seorang pekerja migran terikat secara hukum kepada perorangan/individu (biasanya majikan), disebut “sponsor” (*kafeel*) untuk masa kontrak kerja mereka. Pekerja migran tidak bisa masuk negara tujuan, berpindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apapun tanpa terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari pihak *kafeel* tersebut. Seorang pekerja harus disponsori oleh seorang *kafeel* untuk memasuki negara tujuan dan tetap terikat pada *kafeel* bersangkutan sepanjang masa tinggal mereka. *Kafeel* harus melapor ke pihak imigrasi jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan mereka dan harus memastikan pekerja migran meninggalkan negara itu setelah kontrak berakhir, termasuk membayar tiket kepulangan mereka. Hukum Kafala tidak sama di tiap negara.

Berikut adalah perbedaan yang terdapat pada hukum Kafala:

- a. Jika dan kapan pekerja dapat pindah pekerjaan (majikan) tanpa izin sponsor (*kafeel*);
- b. Hak pekerja untuk dapat berhenti pekerjaan tanpa izin dari sponsor (*kafeel*);

¹⁷ Khan, Azfar and Hélène Harroff-Tavel, *Reforming the Kafala: Challenges and Opportunities in Moving Forward*, Asian and Pacific Migration Journal, Vol. 20, hlm 293

- c. Hak pekerja untuk meninggalkan negara tanpa izin dari sponsor (kafeel)¹⁸.

2. Law No. (68/2015) About Domestic Manpower

Pada pertengahan Juni 2015, pemerintah Kuwait telah membuat undang-undang yang mengatur para *domestic workers* (PRT) yang berada di Kuwait¹⁹, dan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2016. Kuwait merupakan negara pertama *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang meregulasi kondisi kerja pada PRT.²⁰

Dalam prakteknya *Law No. (68/2015) about Domestic Manpower* belum berjalan secara maksimal, hal ini tercermin dari informasi salah seorang pegawai Kementerian Dalam Negeri Kuwait menyatakan bahwa Departemen Tenaga Kerja Dalam Negeri Kuwait telah berhasil menuntut majikan untuk membayar gaji yang belum terbayar terhadap PRT sebesar KWD 13.000 (Rp. 616.000.000,00) setelah setahun undang-undang ini diberlakukan.²¹ Jumlah tersebut tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dihadapi tenaga kerja

¹⁸*Understanding Kafala: An Archaic Law at Cross Purposes with Modern Development*, <https://www.migrant-rights.org/2015/03/understanding-kafala-an-archaic-law-at-cross-purposes-with-modern-development>. Diakses pada tanggal 25 November 2017, Pukul 21:55 WIB.

¹⁹*UAE Announces Reforms to Labor Rules Kuwait and Qatar More Forward on Unified Contracts*, <https://www.migrant-rights.org/2015/10/uae-announces-reforms-to-labor-rules-kuwait-and-qatar-more-forward-on-unified-contracts/>. Diakses pada tanggal 25 November 2017, Pukul 16:00 WIB.

²⁰*Kuwait Sets Minimum Wage Domestic Workers*, <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/kuwait-sets-minimum-wage-domestic-workers-160714143830769.html>. Diakses pada tanggal 25 November 2017, Pukul 09:45 WIB.

²¹*Kuwait's Domestic Labor Law One Year Later*, <https://www.migrant-rights.org/2017/01/kuwaits-domestic-labor-law-one-year-later/>. Diakses pada tanggal 24 november 2017, Pukul 11:57 WIB.

pembantu rumah tangga dari berbagai negara yang bekerja di Kuwait.

Berikut adalah beberapa pasal yang dinilai dapat melindungi hak pekerja dan berbeda dari sistem *kafalah*:

Article 4:

The licensee or its employees or its associates within or outside Kuwait are not permitted to charge the domestic worker (and the like) any fees in return for employing the worker with an employer or arranging for the worker to stay employed with the employer, whether such charges are direct or indirect. If it is proven that such fees have been charged at any stage of the employment process, the licensee will be penalized in accordance with the Penal Code for the crimes of extortion and illicit gains. The recruitment office may not be used as housing for the labourers.

Di Pasal 4 undang-undang ini, melarang perekrut berlisensi dan rekan mereka (baik di dalam maupun di luar Kuwait) untuk membebankan pekerja rumah tangga dan biaya dengan imbalan merekrut atau mempekerjakan mereka.

Article 5:

The offices are not permitted to advertise, promote or categorize the labourers according to faith, gender, colour or cost, or advertise them in any humanly degrading manner.

Di Pasal 5 undang-undang ini, kantor perekrutan juga dilarang menggunakan metode iklan untuk layanan rekrutmen mereka yang mengklasifikasikan pekerja rumah tangga berdasarkan agama, jenis kelamin, ras atau biaya perekrutan mereka, atau menggunakan praktik yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan mereka.

Article 7:

The employer is obligated to pay the agreed wage to the domestic worker that works for the employer at the end of every month. Transfer receipts are types of proof that the domestic worker has received his/her wages

Di Pasal 7 undang-undang ini, majikan harus berkomitmen untuk membayar upah pekerja rumah tangga yang telah disepakati pada akhir bulan. Salah satu bentuk bukti pembayaran upah adalah tanda bukti transfer.

Article 9:

The employer is required to provide the domestic worker with food, clothing, medicine and medical treatment and housing

Di Pasal 9 undang-undang ini, majikan harus menanggung biaya pekerja rumah tangga yang mencakup makanan, perawatan medis, pakaian dan akomodasi.

Article 12

The employer is not allowed to keep in his possession any of the domestic worker's personal identity documents, such as passport or civil status card, unless the domestic worker has agreed thereof.

Di Pasal 12 undang-undang ini, majikan dilarang menyimpan dokumen pekerja termasuk dokumen identifikasi pribadi seperti paspor atau kartu identitas tanpa persetujuan pekerja.

Law No. (68/2015) about Domestic Manpower bertujuan untuk mengisi kekurangan badan legislatif yang berhubungan

untuk pengorganisasian pekerja domestik di Kuwait, hal ini bermula sejak hukum ketenagakerjaan berada di sektor swasta dan tidak berlaku untuk mereka, meskipun faktanya bahwa mereka merupakan rasio besar tenaga kerja asing, dan juga ketentuan legislatif saat ini tidak menjamin hukum penuh perlindungan untuk kategori ini, dan telah menyebabkan organisasi profesional internasional, yang bersangkutan dengan hak asasi manusia, untuk mengekspos Kuwait untuk pelanggaran hak-hak orang-orang ini, selain itu ketegangan hubungan diplomatik dengan negara-negara, dari mana orang-orang itu direkrut dan manifestasi dari fenomena yang merugikan seperti meningkatnya tingkat kejahatan dan membebani negara dengan uang yang luar biasa pada tingkat pemulangan tenaga kerja domestik ke negara asal mereka.

Law No. (68/2015) about Domestic Manpower terdiri dari (54) artikel, didistribusikan pada sembilan (9) bab, mengurus pengorganisasian urusan tenaga kerja dalam negeri, seperti kondisi untuk pemberian lisensi ke kantor, kewajiban pihak-pihak dalam kontrak, pengusaha, tenaga kerja domestik, kantor perekrutan, upah, pekerjaan jam, daun dan pekerjaan remaja dan kemudian denda dan metode untuk penyelesaian sengketa dan pada ketentuan umum terakhir. Bab-I dalam artikel pertama yang ditetapkan pada definisi dari pekerja rumah tangga, majikan dan kantor yang berada di bawah ketentuan undang-undang ini,

dan mereka adalah kantor rekrutmen berlisensi untuk membawa tenaga kerja domestik dari luar negeri dan juga Departemen Tenaga Kerja Domestik didefinisikan sebagai Departemen Tenaga Kerja Domestik, di bawah Kementerian Interior Sementara Bab-II menyertakan artikel (2 dan 3, sedangkan artikel 2 memiliki sistematisasi kondisi untuk masalah lisensi ke kantor perekrutan dan pembaruan mereka, sementara artikel 3 dilarang perekrutan tenaga kerja domestik tanpa lisensi.

Sementara Bab III, dalam artikel (4,15) diuraikan kewajiban para pihak dalam kontrak yaitu. rekrutmen dan kantor-kantor yang dilarang majikan dan pekerja rumah tangga perekrutan dari penerimaan dari tenaga kerja dalam pertimbangan domestik pekerjaan mereka, atau dari mempromosikan menghina jalan mendiskriminasi mereka dalam istilah atau nilai kemanusiaan manusia. Aspek ini mengharuskan majikan untuk membayar upah pada waktunya dan mewajibkan dia memberi makan dan perawatan dan pakaian berlindung, buruh, dan tidak mempercayakan dia dengan pekerjaan atau menghina kehormatan kemanusiaan, dan juga hukum mewajibkan buruh untuk mematuhi kondisi kontrak dan penyimpanan aset dan properti majikan dan rahasianya sedangkan bagian pertama.

Bab-IV dituangkan pada unsur-unsur dasar dalam pekerjaan dan tenaga kerja kontrak dan pada masa garansi dan kasus-kasus di mana dapat dibagikan dengan buruh jasa dan dia

akan dipulangkan ke negara asalnya, karena adanya cacat fisik atau pelanggaran hukum dan memberikan informasi yang salah atau merugikan kepentingan publik, dan juga ditetapkan pada data dasar yang harus dimasukkan dalam kontrak perekrutan Dan dalam bagian kedua dari bab yang sama yang dituangkan pada ketentuan yang terkait dengan upah dan yang ketiga bagian usia tetap pekerja yang direkrut untuk pekerjaan yang seharusnya tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun. Dan Bab-v menetapkan jam kerja dan pergi,

Bab-VI manfaat layanan akhir dan Bab VII menetapkan denda dan tindakan administratif-penghukuman yang seharusnya diterapkan pada pemilik kantor, majikan dan buruh dalam melakukan pelanggaran hukum. Tapi Bab VIII bagaimana menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan yang diatur, melalui tindak lanjut dari metode bertingkat, dimulai dari negosiasi dan kemudian gangguan dari kantor Rekrutmen dan kemudian Departemen Tenaga Kerja Domestik dan akhirnya ke pengadilan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan sebuah negara yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Berikut ini fungsi perwakilan diplomatik di luar negeri sesuai dengan Konvensi Wina 1961, Pasal 3 Ayat (1) yaitu:

1. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima.
4. Memberikan laporan secara berkala tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima.
5. Meningkatkan kerja sama kedua negara diberbagai bidang, seperti bidang perdagangan pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu, menurut Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang organisasi Perwakilan Diplomatik RI di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar RI dan perutusan RI yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah RI.

Hubungan diplomatik antar-negara dilakukan atas kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lainnya²². Dengan adanya suatu pembukaan hubungan diplomatik oleh negara pengirim kepada negara

²² Boer Mauna, **Hukum Internasional: Hubungan Diplomatik dan Konsuler**, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 521

penerima, maka pengakuan sebagai suatu negara yang berdaulat-pun akan muncul secara langsung²³

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, berikut merupakan penjelasan mengenai Perwakilan Diplomatik. Perwakilan Diplomatik pada poin 4 Keputusan Presiden No. 108 tahun 2003 disebutkan bahwa:

“Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.”

Pada Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa, Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia

Kedutaan besar Republik Indonesia (selanjutnya disebut KBRI) adalah kantor perwakilan Republik Indonesia di sebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang Duta Besar.

Khusus Taiwan, dikarenakan di antara kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik namun memiliki hubungan dagang dan ekonomi yang besar, maka pemerintah Indonesia menempatkan sebuah

²³ Ibid, hlm. 522

perwakilan dagang di Taipei yang melaksanakan fungsi-fungsi Perwakilan seperti masalah konsuler visa, perdagangan, ekonomi dan kebudayaan termasuk perlindungan TKI didalamnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) merupakan perwakilan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Wakil Tetap Republik Indonesia, diangkat oleh Presiden untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

2. KBRI Kuwait

KBRI Kuwait merupakan salah satu perwakilan yang cukup strategis dan penting di Timur Tengah. Indonesia dan Kuwait memegang prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan berusaha menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai, adil dan bermartabat. Seperti halnya Indonesia, negara Kuwait aktif memainkan peran, baik ditingkat regional maupun global khususnya melalui lembaga-lembaga dibawah PBB, GCC, OKI, kelompok 77 dan Gerakan Non-Blok.

Hubungan diplomatik Indonesia-Kuwait secara resmi dibuka pada tanggal 28 Februari 1968. Kebijakan politik luar negeri Kuwait difokuskan kepada negara-negara teluk (GCC) yaitu Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain. Disamping itu, terdapat *partner* yang dinilai strategis oleh Kuwait, yaitu 2 negara tetangga langsung (Iran dan Irak) serta 5 negara anggota tetap DK PBB. Dalam perkembangannya 7 negara yang dianggap penting dalam politik luar negeri Kuwait adalah Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Malaysia, Turki dan Brazil.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Kuwait merupakan aspek penting yang telah terjalin cukup lama dan saling menguntungkan. Sebagai negara produsen minyak yang besar, Kuwait merupakan salah satu pemasok minyak bagi kebutuhan industri dan transportasi di Indonesia. Kuwait dengan kemampuan finansial yang kuat dan perekonomian yang terbuka merupakan pasar potensial bagi produk-produk ekspor Indonesia. Namun neraca perdagangan yang tidak seimbang dengan defisit yang signifikan di pihak Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi. Angka defisit yang cukup menonjol dikarenakan impor minyak Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi.

Perkembangan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut keberadaan WNI/ TKI di Kuwait. Dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh WNI/TKI yang merugikan harkat dan martabat bangsa, KBRI Kuwait mendorong pemerintah pusat untuk

mempertahankan kebijakan moratorium pengiriman TKI Informal ke Kuwait. Berkat kebijakan yang telah diterapkan sejak tahun 2009 tersebut, lambat laun jumlah TKI Informal yang bermasalah di Kuwait semakin menurun.

Di bidang sosial budaya berbagai kegiatan diplomasi telah dilaksanakan dalam memajukan hubungan antar masyarakat kedua negara. Kegiatan tersebut meliputi kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Universitas Kuwait untuk melakukan pertukaran informasi mengenai pengembangan pendidikan tinggi di kedua negara, promosi budaya dalam bentuk penampilan kesenian Indonesia di berbagai acara kebudayaan baik yang dilakukan sendiri oleh KBRI maupun yang diorganisir oleh pemerintah Kuwait dan lembaga sosial setempat. Selain itu, KBRI Kuwait juga melakukan pengiriman jurnalis Kuwait ke Indonesia untuk meliput berbagai obyek-obyek wisata Indonesia untuk dimuat pada media setempat, dan lain-lain

Di bidang Pariwisata, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan Kuwait ke Indonesia, Khususnya sejak banyaknya konflik yang melanda daerah tujuan pariwisata di Timur Tengah seperti di Mesir, Syria, Libanon, Irak, serta masih terdapatnya sentimen anti-Arab di beberapa negara Eropa

Bali merupakan tujuan favorit wisatawan asal Kuwait. Biasanya kunjungan tersebut dirangkaikan dengan Jakarta dan Bandung/Bogor. Daerah-daerah pariwisata lainnya seperti Lombok, Raja Ampat,

Wakatobi, Gunung Bromo, dsb masih belum dikenal oleh wisatawan asal Kuwait

Adapun fungsi-fungsi yang terdapat pada KBRI Kuwait yaitu:

a. Fungsi Konsuler

Perwakilan konsuler adalah perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan hubungannya dengan negara lain diluar bidang politik. Perwakilan Konsuler tidak memiliki peranan seperti perwakilan politik, fungsinya cukup terbatas hanya pada masalah-masalah administratif²⁴. Menurut Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: Sk.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi:

“Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.”

Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.

Fungsi Konsuler bersama fungsi protokoler terkhusus dalam KBRI Kuwait memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan WNI dan BHI di Kuwait, mengupayakan ketersediaan pengacara untuk penyelesaian kasus hukum WNI/BHI, mengoptimalkan

²⁴ Boer Mauna, **Op. Cit.**, hlm. 533

penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah, memfasilitasi pembentukan perjanjian / kesepakatan/ MoU di bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara Kuwait, memfasilitasi implementasi perjanjian / kesepakatan/MoU di bidang perlindungan dengan negara Kuwait, memberdayakan masyarakat Indonesia di Kuwait bagi penanganan WNI bermasalah termasuk pembentukan satgas, melakukan survei kepuasan pelayanan kekonsuleran

b. Atase Tenaga Kerja

Atase ketenagakerjaan merupakan tenaga perbantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sepenuhnya berada di bawah kendali operasi Duta Besar, mempunyai tugas pelayanan tenaga kerja dan diantaranya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pendataan TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, penilaian terhadap mitra usaha atau agen dalam pengurusan dokumen TKI, upaya advokasi TKI, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja serta pembinaan TKI yang telah ditempatkan. Atase bertugas membantu pekerjaan seorang menteri negara yang diwakilinya untuk melakukan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengamatan dan diplomasi di bidang terkait dengan negara tempat para atase ditugaskan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Atase tidak hanya bertanggung jawab kepada Duta Besar tetapi juga bertanggung jawab kepada Menteri yang terkait dengan bidangnya.²⁵

c. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi mempunyai tugas untuk memfasilitasi kunjungan menteri atau pejabat tinggi yang terkait dengan isu ekonomi, mengupayakan peningkatan kunjungan misi dagang/pengusaha yang berhasil didatangkan perwakilan Republik Indonesia, menindak lanjuti kesepakatan ekonomi yang dihasilkan (kesepakatan ekonomi dapat berupa penandatanganan MoU/ perjanjian, komitmen investasi dan perdagangan) , menyelesaikan sengketa/ kasus bisnis yang terjadi, menindaklanjuti minat investasi pengusaha di negara akreditasi dan sebaliknya, mengupayakan kunjungan wisatawan dari Kuwait ke Indonesia.

d. Fungsi Pensosbud

Fungsi Pensosbud (Penerengan Sosial Budaya) memiliki fungsi membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di Kuwait, meningkatkan kualitas pengelolaan *website* atau portal perwakilan untuk menarik minat pengunjung mengakses informasi tentang Indonesia, memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/ pelatihan di negara Kuwait dalam mendukung kegiatan perwakilan Republik Indonesia, mengupayakan /memfasilitasi kunjungan jurnalis untuk meningkatkan citra Indonesia di negara

²⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Atase_kedutaan. Diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 18:00.

Kuwait, membangun *networking* di negara Kuwait, mengupayakan kunjungan/pejabat tinggi yang terkait dengan isu Pensosbud, mengupayakan tindak lanjut kesepakatan/kerjasama di bidang penerangan sosial dan budaya, menyelenggarakan misi kesenian / kebudayaan, memfasilitasi aktivitas/prakarsa/program diaspora Indonesia

e. Fungsi Politik

Fungsi politik memiliki tugas untuk melakukan pendekatan (*lobby*) kepada *stakeholders* terkait di negara Kuwait, mengembangkan jejaring kerja (*networking*), menyusun rekomendasi di bidang maritim dan perbatasan, menyusun rekomendasi terkait pengembangan infrastruktur poros maritim Indonesia, menyusun laporan/ kajian hasil kunjungan pejabat tinggi/ menteri, menyusun laporan/ kajian mengenai implementasi langkah aksi cetak biru 3 komunitas ASEAN (Polkam, Ekonomi, dan Sosial Budaya) menyampaikan usulan/prakarsa di bidang politik, hukum dan keamanan untuk posisi Indonesia dalam negoisasi/ perundingan bilateral, regional dan multilateral, menyusun rencana aksi tindak lanjut komitmen hasil kunjungan Kepala Negara/Kepala Pemerintah/Menteri dan pejabat tinggi negara, merealisasikan rencana aksi sebagai implementasi perjanjian / kesepakatan di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditandatangani, mengupayakan dukungan *stakeholders* di negara Kuwait terhadap kedaulatan NKRI dan/atau pernyataan tidak mengakui gerakan-gerakan separatis, memfasilitasi

upaya pengiriman misi perdamaian dalam kerangka PBB, melakukan upaya penggalangan terhadap pencalonan Indonesia pada lembaga atau organisasi Internasional

E. Tinjauan Umum Mengenai Notifikasi

1. Definisi dan Dasar Hukum Notifikasi

Hak untuk mendapat notifikasi dan akses tercermin pada Pasal

36 Konvensi Wina 1963

"1. With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:

(a) consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending State;

(b) if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph;

(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

*2. The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended."*²⁶

Hal ini diterima secara luas sebagai standar praktek internasional oleh negara peserta maupun bukan negara peserta. Hal

²⁶ Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pasal 36

ini disebabkan karena konvensi tersebut didasarkan pada keyakinan negara-negara, sebagaimana yang tertara di dalam *preamble*, bahwa konvensi tersebut menjadi kontribusi sebagai pengembangan atau hubungan persahabatan antar negara-negara. Tentunya hal ini tidak terpengaruh pada konstitusional negara-negara yang berbeda.²⁷

Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara detail tentang definisi atau sistem kerja dari notifikasi. Namun Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa notifikasi adalah :

- a. Suatu pemberitahuan dari suatu negara penerima kepada perwakilan negara pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka;
- b. Suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum internasional kepada perwakilan negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi di negara penerima;
- c. Suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan dari perwakilan negara mereka.²⁸

²⁷ Hal ini disampaikan oleh Kedutaan Amerika terhadap Pemerintah Siria sebagai tanggapan atas ditangkapnya dua warga negara Amerika Serikat di Damaskus pada 2 Januari 1975. Penangkapan tersebut tidak disertai adanya notifikasi dan tidak disetujuinya permintaan akses konsuler kepada tahanan. Dikutip dari Luke T. Lee, *Consular Law and Practice*, Second Edition, Oxford University Press, New York, 1991, h. 145.

²⁸ Hassan Wirayuda, *Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia* diakses pada 24 November 2017

Bantuan dengan adanya notifikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, akan tetapi setiap tindakan mengandung tujuan dasar, yaitu:

- a. Kemanusiaan, Perwakilan Negara pengirim menyediakan akses ke dunia luar kepada para tahanan (contohnya menyediakan sarana komunikasi dengan keluarga dan teman tahanan) dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan diberikan kebutuhan dasar mereka saat ditahan. Kehadiran perwakilan negara pengirim juga meringankan tekanan pada tahanan dengan keyakinan bahwa wakil dari kekuasaan negara asal mereka akan melindungi kepentingan mereka.
- b. Perlindungan, perwakilan negara pengirim mengunjungi warga negaranya yang sedang ditahan di wilayah negara lain untuk meyakinkan bahwa perlakuan yang diberikan layak menurut hukum. Kunjungan yang tetap diharapkan dapat menghalangi terjadinya suatu pelanggaran oleh petugas yang menahan. perwakilan negara pengirim juga diperbolehkan untuk menengahi secara langsung saat terbukti terdapat perlakuan yang tidak sesuai pada tahanan.
- c. Bantuan hukum, perwakilan negara pengirim memperkenalkan dasar perlindungan, prosedur, hukuman yang diperbolehkan dalam sistem hukum negara penerima pada para warga negara yang menjadi tahanan. Mereka juga

menyediakan pengacara lokal untuk membela mereka, mempersiapkan pembelaan, dan intervensi yang legal demi kepentingan warga negara tersebut.

- d. Bantuan yang diberikan oleh perwakilan negara pengirim bagaimanapun bersifat terbatas, perwakilan negara pengirim tidak dapat memberikan kekebalan hukum pada warga negaranya dalam hukum negara penerima. Selain orang-orang yang menerima kekebalan dipomatik dan konsuler, semua warga asing yang ditahan di luar negeri secara penuh dapat menjadi subjek hukum dan terikat pada prosedur hukum negara penerima, termasuk segala jenis hukuman yang dijatuhkan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum negara tersebut.

Dari beberapa hasil interpretasi di atas dapat ditarik suatu definisi bahwa notifikasi adalah pemberitahuan formal dari fakta atau peristiwa mengenai warga negara asing. Teguh Wardoyo, Direktur perlindungan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut PWNI) /badan hukum Indonesia (selanjutnya disebut BHI), berpendapat bahwa notifikasi merupakan suatu kesepakatan timbal balik dan bersifat teknis yang mengatur penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi.²⁹ Pada Pasal 37

²⁹Teguh Wardoyo, **Tabloid Diplomasi : Langkah Strategis Perlindungan WNI**, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan-wni.html> diakses pada tanggal 26 November 2017

Konvensi Wina 1963 disebutkan pula bahwa notifikasi tersebut tidak hanya berlaku pada penangkapan dan penahanan warga negara saja, namun juga mencakup perwalian, korban kekerasan, korban *trafficking*, pemindahan jenazah, kecelakaan udara, kematian, kelahiran, *overstayer*, ekstradisi, asuransi, dan lain sebagainya.³⁰

Beberapa ahli hukum internasional menyatakan bahwa bantuan konsuler tersebut sendiri bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya notifikasi maka bantuan hukum tidak akan dilaksanakan cepat oleh perwakilan negara pengirim sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi, seperti: ketidakadilan dalam proses peradilan, perlakuan yang tidak layak, dan lainnya. Di sisi lain, notifikasi dan bantuan konsuler merupakan hak yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler bagi warga asing agar mendapat perlakuan yang layak saat menjalani

³⁰ Berikut isi dari Pasal 37 Konvensi Wina 1963 :

If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving state, such authorities shall have the duty;

- (a) In the case if **the death of a national of sending state**, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred;*
- (b) To inform the competent consular posts without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the **interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of sending state**. The giving of this informations shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving state concerning such appointments;*
- (c) If vessel, **having the nationality of the sending state**, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving state, or if a aircraft registered in the sending state suffers an accident on the territory of the receiving state, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.*

proses peradilan di luar negara asalnya. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut termasuk pelanggaran terhadap konvensi tersebut.

Salah satu alasan mengapa notifikasi dianggap sangat penting dan bahkan sering dikategorikan sebagai hak asasi manusia adalah banyaknya kasus-kasus dimana warga asing yang menjadi tahanan di negara lain dijatuhi hukuman mati tanpa diberitahukan mengenai adanya hak untuk melakukan notifikasi dan negara asal orang tersebut tidak mengetahui masalah penjatuhan hukuman tersebut. Di samping itu, sebagian tahanan asing juga sering kali tidak peduli terhadap hak yang mereka miliki untuk melakukan notifikasi. Saat ini, beberapa negara, misalnya: Amerika dan Inggris telah membentuk peraturan nasional yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan notifikasi dan pemberian bantuan konsuler. Walaupun perkembangan mengenai pengaturan perlindungan konsuler dengan kewajiban notifikasi, sampai saat ini belum terdapat suatu kepastian ataupun kejelasan mengenai kapan notifikasi harus dilakukan. Di dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 36 Ayat 1 huruf (b) menyatakan bahwa notifikasi harus dilakukan “tanpa adanya penundaan”. Waktu yang pasti belum diberikan batasan yang jelas dalam hukum Internasional sehingga beberapa negara membuat ketentuan sendiri mengenai pengaturan tersebut. Inggris, dalam hukum nasionalnya

mengatur bahwa notifikasi harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah mengetahui tahanan adalah warga asing.

Walaupun ketentuan batasan waktu belum jelas, notifikasi seharusnya dilakukan setelah adanya pengecekan identitas tahanan saat dilakukan penahanan ataupun saat menginterogasi tahanan. Walaupun terdapat kemungkinan bahwa identitas tahanan sebagai warga asing setelah berlangsungnya proses peradilan ataupun penjatuhan hukuman, maka prosedur notifikasi akan dilakukan pada saat itu. Ketepatan waktu diperlukan demi memperjuangkan hak-hak tahanan dan berguna untuk dapat menyediakan bantuan-bantuan yang berarti bagi tahanan asing. Bantuan seharusnya dapat diberikan oleh negara asal melalui pejabat diplomat ataupun konsuler sebelum terdapat perlakuan yang tidak adil bagi tahanan asing dan putusan yang tidak seharusnya diberikan.

Makamah Internasional memberikan keputusan bahwa notifikasi yang dilakukan tanpa adanya penundaan tidak harus dilakukan seketika saat dilakukannya penangkapan. Pengaturan mengenai batasan waktu belum terdapat ketentuannya, maka ditinjau dari kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara menunjukkan bahwa notifikasi seharusnya dilakukan saat telah diketahuinya seorang tahanan merupakan warga asing ataupun

terdapat kemungkinan bahwa tahanan tersebut merupakan warga asing.

Untuk memaksimalkan perlindungan warga negara yang negara asing, di dalam Konvensi Wina 1963 pada Pasal 36 diatur pula tentang kewajiban *receiving state* dalam hal pelaporan atas keadaan warga negara *sending state* apabila dinyatakan bermasalah dengan hukum. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila warga negara *sending state* melakukan permintaan, pihak yang berwenang dari *receiving state* wajib, tanpa menunda, untuk memberikan informasi kepada perwakilan negara pengirim. Bentuk pelaporan tersebut didukung pula dengan fasilitas pendukung fungsi konsuler yang berupa kebebasan berkomunikasi oleh petugas konsuler di negara tersebut kepada warga negaranya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³¹ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Empiris. Menurut Amirudin dan Zainal Aisikin,³² Penelitian Yuridis Empiris adalah Penelitian yang fokus pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi (1) kaidah hukum itu sendiri, (2) Penegak Hukum, (3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) Kesadaran masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.³³ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana urgensi *Notification* sebagai salah satu upaya perlindungan

³¹ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

³² Amirudin dan Zainal Aisikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

³³ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm 94.

tenaga kerja Indonesia di Kuwait dan Bagaimana model optimalisasi upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui Notification di Kuwait

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Karena Kuwait adalah salah satu Negara yang cukup banyak memiliki jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- 2) Karena banyak Tenaga Kerja Indonesia di Negara Kuwait yang memiliki permasalahan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁴ Sumber pertama yang dimaksud adalah hasil penelitian di lapangan yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap data utama yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder diperoleh melalui sumber tangan kedua atau ketiga secara berjenjang, yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian

³⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 2012

berwujud, Peraturan Perundang-Undangan serta bahan yang bersumber dari internet.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Pihak-Pihak tersebut antara lain:

1. Duta Besar Indonesia untuk Kuwait H.E. Tatang Budi Utama Razak
2. Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia
3. Tenaga Kerja Indonesia yang berdomisili di Kuwait

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Kota Malang. Penulis juga melakukan studi terhadap data-data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi data tersebut berasal dari media cetak dan elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Metode yang efektif dalam pengumpulan data primer adalah wawancara atau deskriptif kualitatif.³⁵ Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun guna memperoleh data yang akurat untuk menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh Penulis, namun berasal dari tangan kedua atau ketiga. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat.³⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat serta mengutip beberapa literatur seperti buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan artikel.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Populasi dibatasi sebagian saja dan dikenal sebagai populasi target. Populasi ini dianggap dapat mewakili karakter populasi secara keseluruhan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait dan TKI yang bekerja di Kuwait.

2. Sampel

³⁵ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 57.

³⁶ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 114.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Duta Besar Indonesia untuk Kuwait H.E. Tatang Budi Utama Razak, dan TKI di Kuwait. dan juga, TKI di Kuwait yang pernah mengalami permasalahan hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang memiliki informasi atau data penting yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian dapat diambil sebagai sampel. Dan *random sampling*, adalah cara pengambilan sampel yang digunakan apa bila populasi dianggap homogen dan tersediannya daftar dari seluruh unit populasi berikut nomor urut seluruh populasinya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian yang dilakukan dengan wawancara di lapangan oleh penulis. Dimana penulis akan melakukan:

1. Kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait dan melakukan peninjauan lapangan.

2. Melakukan wawancara langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait dan Atase Tenaga Kerja KBRI Kuwait.
3. Melakukan wawancara langsung dengan warga negara Indonesia terkhusus TKI PRT yang berada di Kuwait

H. Definisi Operasional

1. Optimalisasi adalah suatu tindakan dan/atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sesuatu.
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah kantor perwakilan utama Indonesia di sebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang duta besar.
3. Perlindungan Hukum adalah suatu usaha untuk memberikan hak yang seharusnya diperoleh kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan hak dan kewajiban yang atur oleh Undang-Undang.
4. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah
5. Notifikasi adalah pemberitahuan formal dari fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan masalah kekonsuleran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi *Notification* Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kuwait

a. Bentuk Tanggung Jawab Negara Atas Warga Negara Indonesia

Saat ini jumlah WNI di luar negeri yang terdata oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah sebanyak 2.761.994 jiwa (per-Agustus 2015), yang sebagian besar di antaranya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun demikian, data dan jumlah riil WNI di luar negeri diperkirakan dapat melebihi jumlah tersebut, mengingat banyak WNI di luar negeri yang tidak melakukan lapor diri ke Perwakilan RI setempat.³⁷ Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, oleh sebab itu banyaknya jumlah WNI di luar negeri pun menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang ditimbulkan tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan WNI di luar negeri terhadap ketentuan hukum dan prosedur-prosedur nasional, serta kurangnya pemahaman WNI akan hukum internasional dan hukum nasional negara dimana ia berada.

Berdasarkan data yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri, sejak tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2014 tercatat sejumlah 12.450 kasus WNI dan BHI di luar

³⁷Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014, **Menlu RI: Perlindungan WNI-BHI adalah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia (online)**, http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=2ba093f5-e8c8-4b73-9349-9a15552fb56b

negeri yang ditangani, dan dari jumlah tersebut, lebih kurang 92,43% atau sejumlah 11.507 kasus merupakan permasalahan yang dialami oleh TKI diluar negeri.³⁸ Jenis permasalahan yang dihadapi oleh TKI tersebut bermacam-macam seperti masalah ketenagakerjaan, keimigrasian, keperdataan dan pelanggaran hukum pidana.

Selain upaya perlindungan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga merupakan institusi pemerintah yang terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang dialami oleh WNI di luar negeri, melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Upaya perlindungan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan WNI tidak terkecuali WNI di luar negeri.

Berdasarkan data yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, terdapat banyak kasus sedang dalam penyelesaian. Berikut jumlah kasus WNI di luar negeri yang ditangani oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, serta beberapa perjanjian International melalui Direktorat HPI terkait permasalahan yang dialami oleh WNI, dimana sebagian besar kasus yang ditangani adalah kasus WNI/TKI:

Tabel 4.1 Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Tahun
2012

Tahun 2012	
Total Kasus	Diselesaikan

³⁸Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014, **Penanganan Kasus Periode 2014**(online) <http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/news/detail/pananganan-kasus-periode-2014>

38.880	80.97%
Kasus dialami TKI tahun 2012 = 20.921 (53.81%)	

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,

2016

Tabel 4.2 Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Tahun

2013

Tahun 2013	
Total Kasus	Diselesaikan
19.218	76.86%
Kasus dialami TKI tahun 2013 = 11.232 (58.45%)	

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,

2016

Tabel 4.3 Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Tahun

2014

Tahun 2014	
Total Kasus	Diselesaikan
22.167	16.414 (81.52%)
Kasus dialami TKI tahun 2014= 20.135 (90.83%)	

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,

2016

Tabel 4.4 Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Tahun

2015

Tahun 2014 (s/d 21 Agustus 2015)		
Total Kasus	Dalam Proses	Diselesaikan
11.621	2.997 (25.79%)	8.624 (74.21%)
Kasus dialami TKI tahun 2015= 10.749 (92.50%)		

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,
2016

Tabel 4.5 Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Tahun
2016

(s/d 13 Agustus 2016)		
Total Kasus	Dalam Proses	Diselesaikan
5.238	2.799	2.439

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,
2016

Tabel 4.6 Rekapitulasi Pengaduan/Kasus WNI di Luar Negeri

Kawasan	Total Kasus	Selesai	On Going
Asia Timur Dan Tenggara	1960	1297	663
Asia Selatan Dan Tengah	5	0	5
Timur Tengah	2896	1336	1560
Afrika	75	2	73
Amerika Utara Dan Tengah	34	13	21
Amerika Selatan	27	3	24
Eropa Barat	20	9	11
Eropa Tengah Dan Timur	46	32	14
Oceania	175	107	68
Karibia	0	0	0

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,
2016

Dapat kita lihat dari tabel diatas, bahwa dari tahun ke tahun, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah menyelesaikan lebih dari 50% kasus dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dan sampai dengan 13 Agustus 2014 terdapat total 5.238 kasus, dengan kasus yang diselesaikan mencapai 2.439 dan kasus yang masih dalam proses sekitar 2.799.

Permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri memang sangat beragam. Total kasus yang TKI yang ditangani sampai dengan periode 13 Agustus 2016 sejumlah 5241 kasus. Berikut adalah rincian kasus yang dialami oleh WNIdi semua kawasan:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Jumlah Kasus Semua Kawasan

JUMLAH KASUS KAWASAN SEMUA	
Periode	01-01-2016 s/d 13-8-2016
NAMA KASUS	JUMLAH KASUS
Arbitrase	1
Asuransi Luar Negeri Belum Dibayar	12
Beban Kerja Terlalu Berat	63
Bencana Alam	2
Dipekerjakan Dibawah Umur	1
Dipekerjakan lebih dari 1 majikan	27
Domestic Violence (KDRT)	17
Gagal penempatan pasca keberangkatan	2
Gaji dibawah standar	35
Gaji tidak dibayar	535
Hilang Kontak	126
Hutang Piutang	2
Ingin Pulang	167
Jenis Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak Kerja	55
Kecelakaan Kerja	71
Kecelakaan lalu lintas	28
Kepemilikan Senjata Api	2
Kerusuhan Politik	309
Konflik bersenjata	1
Korban Penembakan	1
Korupsi	2
Kriminalitas lainnya	26
Kurang waktu istirahat	23
Lain-lain	101
Majikan cerewet	92
Majikan stress	7
Melarikan diri dari rumah majikan	121
Melepaskan kewarganegaraan	17
Meninggal dunia	186
Money Laundering (Pencucian uang)	3

Narkoba	41
Overstay	310
Pelanggaran Batas Wilayah	19
Pelanggaran keimigrasian lainnya	1,150
Pelecehan Seksual	30
Pemalsuan Dokumen	31
Pembajakan Kapal	7
Pembunuhan	23
Pencabulan Anak	2
Penculikan	3
Pencurian	45
Penganiayaan Fisik	113
Penipuan	35
Penyalahgunaan Izin Tinggal	29
Penyanderaan	2
Penyelundupan Barang	7
People Smuggling (Penyelundupan orang)	6
Perampokan	4
Perebutan Hak Asuh	7
Perkelahian	45
Perkosaan	11
PHK	31
Potongan gaji tidak sesuai ketentuan	24
Prostitusi	4
Sakit	171
Sengketa Bisnis	2
Sengketa Waris	1
Sihir	10
Terorisme	3
Tidak Betah	255
Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	352
Trafficking in Person (Perdagangan orang)	294
WNI Terlantar	82
Zina	56
Total	5,241

Sumber : *database* Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 2016

WNI di Kuwait berdasarkan catatan KBRI diawali dengan masuknya tenaga perawat dan sejumlah teknisi di bidang perminyakan pada awal dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Kuwait tahun

1968. Sejak dimulainya pengiriman TKI secara resmi pada tahun 1997, jumlah WNI di Kuwait mengalami puncaknya pada tahun 2000an dengan jumlah sekitar 72.000 orang yang mayoritas adalah TKI. Berdasarkan data dari *General Department Of Residency Affairs Kuwait*, pemerintah Kuwait mengkategorikan WNI di Kuwait yang berlandaskan pada *entry visa*, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.8. Jumlah WNI Di Kuwait Tahun 2017 Berdasarkan *Entry*

Visa

<i>Article</i>	Penjelasan <i>Article</i>	Laki-laki	Perempuan	Total
Visa 17	Pekerja pemerintahan	351	184	535
Visa 18	Pekerja formal	733	834	1567
Visa 20	Pekerja rumah tangga	19	3746	3765
Visa 22	Keluarga	302	902	1204
Visa 23	Pelajar	8	2	10
Visa 24	Kuasa diri	0	12	12

Sumber: *database general department of residency affairs* Kuwait

Dengan diberlakukannya moratorium pengiriman TKI pada tahun 2009, data imigrasi pada tahun 2017 jumlah WNI/TKI di Kuwait berjumlah 7.093 WNI/TKI yang terdiri dari 3.765 TKI Informal dan sisanya sebesar 3.328 merupakan TKI Formal pelajar dan keluarga. Adapun perkembangan data TKI (pemegang visa 20) dalam periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Jumlah TKI Di Kuwait Tahun 2009 -2017

No	Tahun	Jumlah
1.	2009	30.157
2.	2010	24.703
3.	2011	21.207
4.	2012	19.101
5.	2013	14.592
6.	2014	6.528
7.	2015	5.499
8.	2016	3.985
9.	2017	3.765

Sumber: *database* KBRI Kuwait

Jumlah keseluruhan TKI di Kuwait berdasarkan KBRI merupakan data yang berhasil diverifikasi, namun terdapat sejumlah TKI yang bersifat ilegal dan tidak terdata. Dengan banyaknya TKI di Kuwait juga tidak lepas dari beberapa kasus, KBRI Kuwait berinisiasi dengan menyediakan *shelter* yaitu tempat penampungan TKI yang berlokasi di dalam kompleks KBRI. Selama berada di dalam penampungan KBRI (*shelter*) tersebut setiap TKI mendapatkan pelayanan sepenuhnya mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, sanitair serta kebutuhan lainnya juga bantuan hukum dengan pengacara yang ditunjuk oleh KBRI.

Tabel 4.10 Data kasus yang ditangani oleh KBRI terhadap TKI yang berada dalam *shelter*

No	Tahun	Jumlah (Kasus)*
1.	2009	11.781
2.	2010	5.707
3.	2011	1.532
4.	2012	407
5.	2013	183
6.	2014	112
7.	2015	64
8.	2016	76
9.	2017	29
Total		19.861

* 1 orang TKI bisa mengalami lebih dari 1 kasus

Sumber: *database* KBRI Kuwait

Pada tahun 2009 *shelter* KBRI Kuwait ditempati sekitar 700 orang TKI PRT bermasalah. Jumlah penghuni *shelter* dari tahun ke tahun menurun secara drastis pasca diberlakukannya moratorium pengiriman TKI PRT ke Kuwait. Moratorium pengiriman TKI PRT ke Kuwait ditetapkan berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. SE.342/MEN/PPTK-TKLN/IX/2009 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Kuwait Untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT).

Dari hasil observasi lapangan bahwa moratorium telah menurunkan jumlah kasus secara signifikan. Dari data yang diperoleh, jumlah kasus pada tahun 2009 tercatat sebanyak 11.712 kasus dan dari tahun ke tahun terus menurun secara drastis, bahkan setelah 7 tahun berlangsungnya moratorium jumlah kasus pada tahun 2017 menjadi 29 (perbulan Juni 2017). Bersumber pada KBRI Kuwait seorang TKI PRT dapat mengalami lebih dari 1 kasus bahkan seorang TKI PRT mengalami 5 kasus yaitu gaji tidak dibayar, tindak kekerasan, pelecehan seksual, jam kerja tidak terbatas serta dipekerjakan di beberapa tempat.

Moratorium memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi perlindungan TKI PRT yang pertama adanya perhatian dari otoritas Kuwait terhadap pengaduan KBRI atas pelanggaran yang dilakukan oleh majikan kepada TKI PRT. Yang kedua adanya pendekatan dari pemerintah Kuwait terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan dan meminta pemerintah Indonesia mencabut moratorium

tersebut. Yang ketiga lahirnya *law No. (68/2015) about Domestic Manpower*. Yang keempat menurunnya jumlah kasus TKI dapat diambil contoh dari jumlah kasus yang masuk KBRI dari tahun 2009 sampai saat ini. Yang kelima meningkatnya citra Indonesia di Kuwait dari segi ketenagakerjaan *Profesional* lainnya dikarenakan Indonesia umumnya identik dengan PRT Namun berkat kerja keras KBRI Kuwait di sektor ekonomi menyebabkan banyak perusahaan atau pebisnis Kuwait yang tertarik akan tenaga profesional Indonesia untuk didatangkan menuju Kuwait ataupun ingin melakukan investasi di Indonesia.

Sejak dimulainya pengiriman secara resmi TKI PRT ke Kuwait pada tahun 1997 terdapat sejumlah permasalahan yang muncul antara lain:

Tabel 4.11 Jenis kasus hukum yang ditangani oleh KBRI Kuwait

No.	Jenis Kasus
1.	Perdata: Uang dipinjam atau diambil namun tidak kembali
2.	Pidana: Tuduhan pencurian, mendapat ancaman, penganiyaan, perlakuan kasar/pemukulan, narkoba, pembunuhan
3.	Keimigrasian: Habis kontrak kerja namun tidak dipulangkan, <i>overstayers</i> , kasus melarikan diri
4.	Ketenagakerjaan: Bertengkar dengan rekan kerja, gaji tidak dibayar, anggota keluarga pengguna jasa terlalu banyak, pengguna jasa cerewet/galak, minta pulang atas kemauan sendiri, perlakuan tidak manusiawi, tidak betah, anggota keluarga majikan terlalu banyak, pekerjaan terlalu banyak atau rumah majikan terlalu besar, TKI tidak mampu atau tidak siap bekerja, tidak diberikan cuti
5.	Pelecehan seksual/ pemerkosaan/ hamil/ mempunyai anak tanpa dokumen
6.	Sakit
7.	Lain-lain: Dicemburui majikan perempuan, difitnah rekan sekerja, pengguna jasa

	bercerai, pengguna jasa kembali ke negara asal sehingga TKI ditelantarkan, pengguna jasa sakit/stress, kecelakaan kerja, dan lain-lain
--	--

Sumber: *database KBRI Kuwait*

Berdasarkan dengan kepentingan dari suatu negara pengirim terhadap negara penerima, maka Indonesia dalam hal ini berhak dan wajib untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang sedang terlibat dalam suatu masalah ataupun tindak pidana di negara penerima, sehingga tanggung jawab negara atas warga negaranya dapat terlaksana dengan baik. Indonesia sebagai negara yang banyak mengirim TKI ke luar negeri mengharuskan setiap pihak kedutaan ataupun perwakilan lainnya untuk memantau dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Karena TKI menjadikan sumber terbesar devisa negara dari tahun ke tahun, sehingga perlindungan dan pengawasan TKI adalah bentuk dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Salah satu capaian KBRI Kuwait adalah hak-hak TKI yang berhasil diselesaikan pada tahun 2009– 2017, dimana banyak sekali TKI yang tidak atau terlambat untuk dipenuhi haknya.

Tabel 4.12 Data capaian KBRI Kuwait 2009-2017

No	Tahun	Hak TKI Yang Berhasil Diperoleh
1.	2009	KWD 67.134 (Rp. 3.140.176.543)
2.	2010	KWD 72.963 dan \$172.000 (Rp. 3.411.660.717 dan Rp. 2.430.852.686)
3.	2011	KWD 35.150 (Rp. 1.643.364.150)
4.	2012	KWD 26.934 (Rp. 1.185.096.000)
5.	2013	KWD 31.290 (1.376.760.000)
6.	2014	KWD 3.470 (152.680.000)

7.	2015	KWD 28.796,21 dan SR 1,600 (Rp. 1.267.033.240 dan Rp. 5679133)
8.	2016	KWD 7.855 (345.620.000)
9.	2017	KWD 5.315 dan 1.300 riyal (Rp.248.517.313 dan Rp. 4.899.473)

Sumber: *database KBRI Kuwait*

b. Urgensi Notifikasi Terhadap Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kuwait

Hak dan kewajiban negara baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional yang utama adalah perlindungan terhadap warga negaranya, warga negara merupakan salah satu unsur pokok dari terbentuknya suatu negara. Warga negara dapat diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal dan menjadi bagian dari penduduk di suatu wilayah yang memenuhi syarat sebagai suatu negara. Adanya status warga negara tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bagi negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warganya.³⁹

Indonesia sebagai negara bertanggung jawab terhadap warga negara Indonesia, sebagaimana amanat Aliena IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) secara tegas mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.

³⁹Kansil, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.206

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.⁴⁰ Salah satu bentuk tanggung jawab negara yang merupakan prioritas adalah perlindungan terhadap keamanan warga negara. Perlindungan terhadap warga negara tidak hanya terbatas pada warga negara yang ada di dalam negeri saja, namun juga warga negara yang berada di luar negeri.

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia merupakan amanat dari konstitusi yang tertuang dalam paragraf keempat preambule Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Selain amanat pembukaan UUD NRI 1945 terdapat pula ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang salah satunya tertuang dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjabarkan bahwa kewajiban perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat *Asas Perlindungan Maksimum* yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib

⁴⁰Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM**, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm.28

memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Republik Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.⁴¹ Sehingga secara mutlak negara bertanggung jawab penuh kepada warga negaranya, dan untuk itulah dibentuknya KBRI dan KJRI di negara asing, guna memantau pergerakan WNI dan melindungi kepentingan WNI di negara Asing.

Konvensi Wina 1961 menjabarkan perlindungan negara terhadap warga negara yang ada di luar negeri yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari fungsi diplomatik dan konsuler suatu negara, yang menegaskan bahwa perwakilan diplomatik berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah dimana telah diakreditasikan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.⁴² Selain itu dalam Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963 yang menyatakan bahwa *“Consular functioning consist in: protecting in the receiving State the interests of sending state and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”* yang dapat juga diartikan bahwa fungsi konsuler terdiri dari perlindungan terhadap kepentingan dari negara pengirim dan warga negaranya, baik individu ataupun badan hukum di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Sehingga dapat diasosiasikan bahwa warga negara dan tenaga kerja

⁴¹Penjelasan Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁴²Setyo Widago, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia, Malang, 2008, hlm.57

Indonesia sebagai individu mendapat perlindungan yang diizinkan dalam ketentuan hukum Internasional. Termasuk juga perlindungan dari penangkapan, penuntutan, hingga penahanan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuwait melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI PRT antara lain dengan menyediakan penampungan, memberikan advokasi dan menunjuk pengacara. Setiap tahunnya KBRI Kuwait harus menangani ribuan kasus dan menampung TKI PRT yang meminta perlindungan. Berikut adalah beberapa kasus lainnya yang ditangani oleh KBRI Kuwait.

Tabel 4.13 Data WNI/TKI yang berada di penjara pusat

No.	Nama Lengkap	Kasus	Tuntutan Hukum	Mulai Menjalani Hukuman	Perkiraan Bebas
1	Caski Binti Rifin	Melarikan TKI/PRT a.n. Akhyati BT Subakti, <i>trafficking in person</i>	15 tahun	19 September 2009	16 September 2016
2	Suharlin Binti Suyarno	Menggunakan narkoba	10 tahun	09 Februari 2009	09 April 2017
3	Asila Binti Mashadi	Menggunakan narkoba	7 tahun 6 bulan	06 Mei 2009	06 November 2016
4	Darto Bin Dirsam Mijan	Mendobrak rumah, pemilikan senjata ilegal, pencurian	7 tahun	September 2008	8 Maret 2017
5	Nurdin Ambutang	Mendobrak rumah, pemilikan senjata ilegal	7 tahun	September 2008	3 September 2016

Sumber: database KBRI Kuwait

Tabel 4.14 Nama-nama TKI yang menjalani hukuman terkait kasus selama di Kuwait pertahun 2017

No.	Nama TKI	Kasus	Lama di Penjara	Jatuh Hukuman
1	Sriwahyuningsih bt Wami	Pacaran	9 bulan	2 tahun
2	Hadnikah bt Sodikin Pakih	Pacaran	6 bulan	1 tahun
3	Anitami bt Rasita	Pacaran, mempunyai anak berumur 9 bulan	6 bulan	Belum ada putusan
4	Ai Mulyati bt Uyat	Pacara, mempunyai anak	1 tahun 3 bulan	Belum ada putusan
5	Yakin Karmini bt Pendiq	Pacaran, mempunyai anak	14 bulan	3 tahun
6	Yanti bt Usuri Latifo	Pencurian dituduh mencuri ATM	13 bulan	2 tahun 6 bulan
7	Pariyasih bt Suparno	Pacaran	1 tahun	2 tahun
8	Iswanti bt Sutego	Pencurian	13 bulan	3 tahun
9	Asila bt Mashadi	Narkoba	3 tahun 6 bulan	7 tahun
10	Rofiah bt Ismam	Narkoba	7 tahun 6 bulan	10 tahun
11	Casti bt Ripin	Penculikan	3 tahun 6 bulan	15 tahun
12	Mainah bt Sunanta	Pembunuhan	6 bulan	10 tahun
13	Yanti bt Maman	Pacaran	1 bulan	4 tahun
14	Anis Suryani bt Suryani	Pacaran	7 bulan	Belum ada putusan
15	Rosita bt Muslim	Pacaran, hamil 5 bulan	3 minggu	3 tahun
16	Ayuni bt Pratiwi	Dituduh mencuri	-	3 tahun
17	Sukari bt Suripdah	Pacaran	-	2 tahun
18	Ela Nurlaela	Dituduh memasukkan laki-laki	-	2 tahun
19	Mimin bt Dohari Aspiran	Pacaran	1 tahun 9 bulan	3 tahun
20	Karsiah bt Kalil Sakim	Pacaran	1 tahun 8 bulan	3 tahun

Sumber: *database* KBRI Kuwait

Dapat kita lihat dari tabel diatas terdapat beberapa kasus yang dialami oleh TKI PRT di Kuwait. KBRI Kuwait dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidaklah mudah mengingat sistem hukum yang berlaku di Kuwait sangat tidak memadai dengan berlakunya sistem *kafala* dimana TKI PRT (*domestic workers*) tidak diatur dalam hukum setempat dan masuk dalam ranah *private*. Dalam hal ini KBRI Kuwait dituntut untuk kerja lebih ekstra dikarenakan KBRI Kuwait tidak mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah Kuwait bahwa adanya WNI yang ditangkap, ditahan dan seterusnya. Hal ini sungguh merugikan dari sisi KBRI Kuwait maupun dari TKI itu sendiri, dikarenakan dengan tidak adanya notifikasi maka hak-hak dari TKI tidak dapat terpenuhi secara utuh sedangkan salah satu upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal ini TKI adalah dengan melalui *Notification*. Notifikasi ini dikeluarkan ketika terjadi hal yang menimpa warga negara Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang mengirimkan TKI ke Kuwait wajib untuk mendapatkan notifikasi dari Kuwait, karena hal ini merupakan perwujudan dari nilai konstitusi yang menuntut perlindungan setiap warga negara di dalam ataupun luar negeri. Notifikasi ini bertujuan agar setiap warga negara Indonesia yang terlibat kasus agar mendapatkan hak-haknya secara utuh di bidang hukum dari Indonesia sebagai negara pengirim, karena dengan adanya notifikasi ini negara dapat memantau perkembangan dan melakukan pendampingan hingga tahap akhir. Selain itu juga

untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran hak warga negara dikarenakan hakwarga negara rentan untuk dirugikan.

Semakin meningkatnya jumlah TKI di Kuwait selain menyumbang banyak devisa negara, para TKI juga berpotensi mendapatkan permasalahan, terutama pidana, mulai penangkapan, hingga penahanan, dalam hal ini Konvensi Wina 1963 menyadari pentingnya suatu notifikasi kepada negara asal, yang mana diatur dalam Pasal 36.

Dalam ketentuan Pasal 36 huruf (b) Konvensi Wina 1963 “.....*a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay....*”,

Berdasarkan data dari KBRI Kuwait masih terdapat kasus perlakuan tidak manusiawi dari pengguna jasa / majikan seperti contoh kasus penganiayaan yang bahkan diantaranya menimbulkan korban jiwa (contoh kasus Nurhalimah pada tahun 2012). Selain itu kasus pidana tersebut pada umumnya disertai kasus gaji tidak dibayar seperti dalam kasus Cayumi Bt Kasan Barat yang disiksa oleh pengguna jasa sehingga mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri. Cayumi Bt Kasan dijanjikan hanya digaji KWD 50 per bulan atau setara dengan Rp. 2.300.000 dan bahkan dirinya tidak pernah menerima gaji selama 118 bulan senilai KWD 5.900/Rp. 259,6 juta).

Kasus tuduhan pencurian oleh pengguna jasa dan bahkan beberapa diantaranya diadili secara *in absentia* di pengadilan (contoh kasus Misni Bt Abubakar yang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara) sering kali terjadi karena pengguna jasa melakukan tuduhan pencurian kepada TKI PRT yang melarikan diri dengan maksud untuk menghindari pembayaran gaji.

Salah satu contoh pentingnya notifikasi adalah terjadi dalam kasus Zahini, yang melibatkan TKI dalam kasus pembunuhan majikan di Arab Saudi, hingga tahap akhir, pemerintah Arab Saudi lalai untuk tidak memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia, yang mengakibatkan gagalnya pendampingan terhadap TKI untuk mendapatkan keadilan, hingga mendapatkan hukuman mati. Hal ini menjadi semakin rumit karena Indonesia terlambat dalam memberikan pendampingan hukum. Hal ini terjadi pula di negara Kuwait bahwa pihak KBRI Kuwait baru mengetahui bahwa ada WNI yang ditahan setelah adanya pemberitahuan dari WNI lainnya ataupun dari keluarga WNI tersebut yang ditahan, KBRI Kuwait juga pernah mendapatkan kasus dimana, KBRI Kuwait baru mengetahui adanya WNI yang ditahan setelah adanya putusan tingkat pertama. Dalam hal ini WNI di Kuwait tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Hal ini dialami oleh Wasiti, mantan TKI PRT yang kini bekerja sebagai staf lokal di KBRI Kuwait. Dalam kasus beliau, Wasiti tidak mendapatkan haknya secara utuh dikarenakan tidak adanya pendampingan diawal dikarenakan tidak adanya notifikasi dari pemerintah Kuwait kepada

perwakilan negara Indonesia. Wasiti menjalani persidangan karena kasus gaji sebesar KWD 1050 (Rp. 46.200.000,00) yang belum terbayar. Setelah 3 tahun menjalani persidangan, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa majikan harus membayar seluruh gaji yang belum terbayar (KWD 1050). Tetapi, hingga sekarang Wasiti tidak menerima uang sepeserpun. Ini menunjukkan bahwa *law enforcement* di Kuwait sangat lemah, meski sudah ada kekuatan hukum tetap saja tidak bisa dieksekusi oleh pihak berwenang.⁴³ Dari beberapa contoh kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa notifikasi ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum setiap warga negara yang berada di luar negeri, sejak adanya penangkapan dari TKI di negara penerima, maka diwajibkan langsung memberikan notifikasi kepada negara asal, dalam Konvensi Wina 1963 tidak dijabarkan mengenai waktu pemberian notifikasi, namun dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dijelaskan "...without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested" dapat didefinisikan bahwa notifikasi ini diberikan semenjak pertama kali permasalahan itu muncul maka pejabat lokal harus menyampaikan kepada perwakilan negara pengirim berdasarkan permintaan.

Dalam Pasal 36 huruf (a) Konvensi Wina 1963 "*Consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular*

⁴³Wawancara dengan Wasiti, staf KBRI.pada tanggal 30 Agustus 2017

officers of the sending State” dijelaskan bahwa anggota konsuler secara bebas dan merdeka untuk berkomunikasi dengan negara pengirim, dan tidak boleh dihalangi oleh pihak negara penerima, terhadap kondisi adanya suatu penahanan dan penangkapan atas warga negara nya, hal ini notifikasi harus segera dilakukan tanpa adanya suatu penundaan, karena menyangkut hak dari warga negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa notifikasi adalah komunikasi formal yang terjadi terkait fakta, baik aksi ataupun peristiwa yang berkaitan dengan masalah kekonsuleran. Tujuan dari notifikasi tidak lain adalah untuk menjamin perlindungan dan kepastian setiap warga negara yang berada atau berkerja di luar negeri.

c. Akibat hukum dari adanya notifikasi

Hukum internasional tidak mewajibkan setiap negara untuk membuka perwakilan diplomatik dan konsuler di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembentukan perwakilan negara asing hanya didasarkan pada *mutual consent* (persetujuan bersama) sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961.⁴⁴ Perwakilan diplomatik dan konsuler tak ubahnya bagaikan perpanjangan tangan dari negara pengirim. Perpanjangan tangan ini kemudian memberikan esensi bahwa terdapat kepentingan antara dua negara, baik kepentingan berupa kerjasama, perdagangan hingga perlindungan warga negara dan lain-lain. Karena merupakan suatu perpanjangan tangan suatu negara maka petugas diplomatik dan konsuler berhak atas

⁴⁴Pasal 2 Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa : “*the establishment of diplomatic relations between State, and permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent*”

suatu kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugasnya di negara lain.

Notifikasi tidak hanya diperuntukkan bagi permasalahan pidana saja, melainkan juga terhadap peristiwa kelahiran, kematian, kecelakaan pesawat udara, perwalian. Setiap hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap warga negara juga harus mendapatkan notifikasi⁴⁵. Sesuai dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 huruf (b)

“if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph”

Dapat kita simpulkan dari Pasal 36 Konvensi Wina 1963 huruf (b) bahwa notifikasi merupakan suatu hal yang wajib sesuai dengan kalimat *“.....receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner”* bahwa apabila seorang warga negara dari negara pengirim ditangkap, ditahan, atau ditawan dalam wilayah konsuler negara penerima, otoritas yang berwenang dari negara penerima akan menginformasikan kepada yang bersangkutan, tanpa adanya penundaan. Namun dalam pasal ini memiliki kelemahan ataupun kekurangan yakni sesuai dengan kalimat

⁴⁵Pasal 37 Vienna Convention on Consular Relations

“if he so requests” yang menandakan bahwa otoritas yang berwenang dari negara penerima harus memberikan pemberitahuan kepada pos konsuler negara pengirim berdasarkan pada adanya permintaan. Melihat kata “he” dari kalimat “if he so requests” disini dapat dicermati bahwa kata ini merujuk pada dua unsur yakni yang pertama merujuk kepada pos konsuler itu sendiri dan yang kedua merujuk kepada warga negara yang ditahan itu sendiri. Oleh karena itu kekurangan dari Pasal 36 Konvensi Wina 1963 huruf (b) yakni notifikasi dapat diberikan tanpa adanya penundaan namun harus berdasarkan permintaan, dapat ditanggulangi dengan dibuatnya perjanjian bilateral yang isinya adalah sebuah permintaan untuk adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Kuwait dimana KBRI Kuwait tidak mendapatkan pemberitahuan dari otoritas berwenang negara Kuwait maka perlu adanya notifikasi. Notifikasi merupakan wujud dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kuwait, yang nantinya akan menghasilkan suatu perjanjian untuk menanggulangi dari kekurangan Pasal 36 Konvensi Wina 1963, yang mana unsur-unsur yang terkandung, baik itu hak dan kewajiban harus dipatuhi kedua pihak, yang menghasilkan kewajiban hukum. Asas dari perjanjian bilateral merupakan *pacta sun servanda* yang mengikat kedua pihak, Perjanjian-perjanjian internasional⁴⁶, baik yang bersifat

⁴⁶Menurut T. May Rudy, **Hukum Internasional I**. PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 4. Bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

umum maupun yang bersifat khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa. Sehingga *notification* ini bersifat final dan mengikat bagi kedua pihak. Artinya ketika salah satu pihak tidak menjalankan prinsip perjanjian yang telah disepakati maka akan mendapatkan sanksi, sanksi dalam hal ini ditafsirkan dalam banyak hal, seperti halnya kasus Amerika Vs Jerman atau Amerika Vs Paraguay, dalam hal ini Amerika telah terbukti melanggar isi perjanjian dalam hal ini notifikasi, sehingga diputuskan bersalah oleh ICJ, namun keputusan hakim tidak bersifat *legally binding*, sehingga tidak mengikat Amerika.

Dalam beberapa interpretasi sanksi juga dapat diputuskan secara bilateral, artinya sanksi yang akan diberikan akan dibahas dan dirundingkan secara bersama. Namun satu hal yang pasti bahwa ketika terjadi pelanggaran isi perjanjian maka sanksi pasti ada, hanya saja sanksi tidak terwujud dalam hal pemberian hukuman selayaknya kasus pidana, karena lingkupnya internasional, maka tidak ada yang bisa memaksakan sanksi terhadap negara yang salah.

Beberapa interpretasi juga memungkinkan adanya pemutusan hubungan diplomatik akibat adanya pelanggaran oleh salah satu pihak, namun hal ini tidak berakibat *ipso facto*⁴⁷ terhadap pemutusan hubungan konsuler Pasal 2 Ayat 3 Konvensi Wina 1963. Maksudnya

⁴⁷*Ipsa Facto* dapat diartikan sebagai “berpengaruh langsung” atau “menghasilkan efek langsung” terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

yaitu apabila terjadi pemutusan hubungan diplomatik antarnegara yang bersangkutan, tidak menyebabkan putusnya hubungan konsuler antar kedua negara tersebut. Berbeda dengan misi diplomatik, beberapa konsulat atau konsulat jenderal dapat dibuka di berbagai wilayah suatu negara. Luasnya wilayah yang di cakup suatu konsulat dalam pelaksanaan tugasnya harus di tetapkan melalui kesepakatan dengan pemerintah negara penerima. Selanjutnya, dapat di katakan bahwa fungsi-fungsi konsulat terutama meningkatkan perdagangan, perlindungan kepentingan warga negara pengirim dan masalah-masalah pelayaran.⁴⁸

Salah satu contoh perjanjian notifikasi adalah antara Indonesia dan Australia pada tahun 2007, saat itu sekitar 50.000 WNI berada di Australia baik untuk studi ataupun bekerja, serta sering terjadi beberapa kasus yang melibatkan TKI, baik kasus keimigrasian ataupun kasus salah tangkap tangan oleh pihak Australia, kerjasama ini merupakan bentuk perwujudan perlindungan TKI di luar negeri, meskipun pada saat penjajakan perjanjian ini banyak terjadi pertentangan dari Australia terkait ketentuan Privacy Act 1988 yang menjamin kerahasiaan data-data pribadi warga negara asing yang ditangkap/ditahan, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk dihubungkan dengan Perwakilan Indonesia di Australia. Namun dengan disepakatinya perjanjian notifikasi Indonesia – Australia maka pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri berjalan dengan lancar,

⁴⁸Boer Maulana, *Op.cit*, hlm. 576.

hal serupa juga terjadi untuk warga negara Australia yang ditangkap oleh polisi laut Indonesia karena terbukti mencuri ikan, akan mendapat notifikasi langsung untuk melindungi hak asasi nya.

d. Fungsi *notification* pada perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Salah satu fungsi dari Pejabat Diplomat atau Konsuler adalah melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim di dalam negara penerima, baik warga negara, individu dan badan-badan perusahaan, dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional⁴⁹. Konvensi Wina 1961 menyebutkan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik antara lain:

1. Mewakili negaranya di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka di akreditasikan
4. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di Negara penerima dengan cara yang dapat dibenarkan oleh hukum
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, terutama dengan negara pengirim dan negara penerima serta

⁴⁹Pasal 5 Huruf a Konvensi Wina 196

mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar mereka,

Sedangkan fungsi perwakilan konsuler adalah menurut

Konvensi Wina 1963:

1. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah Negara penerima, baik secara individu maupun terhadap badan-badan usahanya dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
2. Meningkatkan pengembangan hubungan-hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima sesuai ketentuan konvensi tersebut.
3. Mencari dan memberikan informasi kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara penerima. Semua itu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Mengeluarkan paspor dan dokumen-dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim dan visa bagi orang-orang setempat yang akan pergi mengunjungi atau bepergian ke negara penerima
5. Membantu dan mendampingi warga negara pengirim, baik secara individual maupun badan-badan usaha warga negara pengirim di negara penerima

6. Berusaha melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya baik secara individual maupun badan usaha apabila terjadi pergantian yang timbul dari “*mortis cause*” di wilayah negara penerima sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara penerima dan sebagainya.

Dapat ditambahkan pula bahwa ruang lingkup fungsi konsuler merupakan suatu kenyataan bahwa fungsinya itu tidak semata-mata diatur dalam satu konvensi internasional saja, melainkan juga kebiasaan internasional, perjanjian bilateral antar negara pengirim dan negara penerima serta hukum nasional dan aturan konsuler lainnya. Sebelumnya negara tersebut harus membuka perwakilan konsulernya terlebih dahulu:

Mengenai pembukaan hubungan konsuler yang hendak dilakukan antar negara, Konvensi Wina 1963 mengaturnya dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

- 1) *The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.*
- 2) *The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.*
- 3) *The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.*

2. Model Optimalisasi Upaya Perlindungan Tenaga Indonesia melalui

Notification di Kuwait

Untuk dapat menangani perlindungan TKI berdasarkan definisi perlindungan TKI yang terdapat dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, mencakup segala upaya baik preventif maupun represif/kuratif dilakukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban serta yang berkaitan dengan pekerjaannya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

a. Perlindungan Secara Preventif atau Edukatif

Perlindungan seperti ini dapat diwujudkan dengan membuat perangkat hukum yang melindungi tenaga kerja Indonesia, seperti:

1. Membuat Undang-Undang yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia (Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) yang perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Kesepakatan bilateral atau multilateral dengan pengguna tenaga kerja Indonesia yang juga membuat mekanisme penempatan TKI dan perlindungannya.
3. Mengupayakan lembaga organisasi tenaga kerja Indonesia melalui organisasi pekerja negara penempatan.

b. Perlindungan Represif atau Kuratif

1. Mendirikan *crisis centre* (terutama di negara penempatan tenaga kerja Indonesia dan di dalam negeri untuk tenaga kerja

Indonesia yang menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, sosial budaya dan sebagainya).

2. Mengikutsertakan tenaga kerja Indonesia dalam program asuransi yang dapat meng-*cover* seluruh resiko (*all risk*) kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya.
3. Moratorium.

Perlindungan TKI tersebut dimulai sejak calon TKI memulai persiapan, penempatan hingga purna penempatan. Perlindungan TKI terus diawasi oleh instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab dari dalam maupun luar negeri berdasarkan peraturan yang telah ada. Dari peraturan yang telah ada di dalam maupun luar negeri mengenai perlindungan TKI menjadi rujukan atau acuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perlindungan hak dan kewajiban TKI di luar negeri.

1. Permasalahan dan Kasus TKI Di Kuwait

Sejak dimulainya pengiriman secara resmi TKI ke Kuwait pada tahun 1997 terdapat sejumlah permasalahan yang muncul antara lain:

- a. Bertengkar dengan rekan kerja
- b. Dicemburui majikan perempuan
- c. Difitnah rekan sekerja
- d. Dituduh mencuri oleh majikan
- e. Gaji tidak dibayar
- f. Habis kontrak kerja tidak dipulangkan
- g. Hamil di luar nikah

- h. Kecelakaan kerja
- i. Rebutan TKI karena Majikan bercerai
- j. Majikan pulang ke negara asal dan TKI ditelantarkan
- k. Mendapat ancaman dari majikan
- l. Meninggal dunia
- m. Minta pulang sebelum kontrak kerja selesai
- n. Narkoba
- o. Pelecehan seksual
- p. Pembunuhan
- q. Perlakuan kasar/pemukulan/penganiayaan
- r. Sakit
- s. Tidak betah karena sejumlah alasan seperti anggota keluarga majikan terlalu banyak, majikan cerewet/galak, pekerjaan terlalu banyak atau rumah majikan terlalu besar
- t. Tidak diberikan cuti
- u. TKI tidak mampu atau tidak siap bekerja
- v. Uang dipinjam majikan dan tidak dibayar

Dari kasus-kasus diatas selama belasan tahun terdapat ribuan TKI yang meminta perlindungan KBRI dan harus ditampung di *shelter*. Untuk keperluan tersebut, KBRI harus menyewa satu gedung tersendiri karena harus menampung sekitar 700 orang dari ribuan kasus setiap tahunnya. Pada umumnya mereka yang ditampung di *shelter* KBRI adalah para TKI yang menghadapi permasalahan dan tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan ke agen penyalur atau pengguna jasa atau majikan.





Kasus-kasus yang ditampung di *shelter* KBRI adalah gaji tidak dibayar dalam waktu lama, jam kerja tidak terbatas, mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Namun banyak juga kasus-kasus yang tidak terlalu serius seperti tidak betah bekerja, berselisih dengan sesama rekan kerja dan mereka menuntut untuk dipulangkan akan tetapi agen penyalur atau majikannya tidak mau memenuhi tuntutan tersebut. Dari kasus-kasus tersebut, terdapat ribuan TKI yang meminta perlindungan KBRI dan harus ditampung di *shelter*.

Dengan banyaknya TKI yang lari dari majikan dan meminta perlindungan, KBRI Kuwait harus menyediakan *shelter* yaitu tempat penampungan TKI yang berlokasi di dalam kompleks KBRI. Selama berada di dalam penampungan KBRI (*shelter*) tersebut setiap TKI mendapatkan pelayanan sepenuhnya mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, sanitair serta kebutuhan lainnya juga bantuan hukum dengan pengacara yang ditunjuk oleh KBRI.

Untuk penanganan kasus perdata dan pidana, pada tahun 2009-2014 KBRI Kuwait menunjuk pengacara tetap dari Legal Group dengan biaya sebesar KD 10.000 (Rp. 450.000.000) per tahun. Dengan menurunnya jumlah kasus yang ditangani KBRI dari tahun ke tahun secara signifikan dan hasil *review* terhadap penanganan kasus TKI, KBRI Kuwait menghentikan kontrak pengacara dengan Legal Group, selanjutnya pada tahun 2015 KBRI menunjuk pengacara Dr. Eissa Al Enezi sebagai pengacara KBRI dan pada tahun 2016 menunjuk Hawraa Nader Al-Habib secara *case by case* yang dilakukan sangat

selektif dan lebih efisien. Berikut adalah bagan awal dari proses penanganan TKI bermasalah di Kuwait.

Bagan penanganan awal TKI Bermasalah di Transit House KBRI
Kuwait

Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			
	Staf Lokal	Atnaker	Kepala Perwakilan	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket
Melakukan pendataan TKI B yang tiba di <i>transit House</i> KBRI				Formulir Pendataan	1 hari	Data TKI	
Melakukan identifikasi masalah dan seleksi kasus TKI B				Formulir pendataan Data TKI	2 hari	Profil Kasus TKI	
Memanggil mitra usaha untuk menyelesaikan kasus				Profil kasus TKI B	1 hari	Surat panggilan	
Membuat surat peringatan kepadamitra usaha dan menginformasikanya kepada asosiasi PPTKIS				Formlir pendataan Surat panggilan Profil kasus TKI B	1 hari	Surat peringatan	

Dari proses awal ini KBRI hanya sebatas melakukan pendataan yang kurang lebih menghabiskan waktu 5 hari kerja, dalam proses awal ini sering kali KBRI Kuwait masih sering menemukan kasus perlakuan tidak manusiawi dari pengguna jasa seperti kasus penganiayaan yang bahkan diantaranya menimbulkan korban jiwa (contoh kasus Nurhalimah pada tahun 2012). Selain itu kasus pidana tersebut pada umumnya disertai kasus gaji tidak dibayar sebagai conroh kasus Cayumi Bt Kasan Barat yang disiksa oleh pengguna jasa



sehingga mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri. Cayumi Bt Kasan dijanjikan hanya digaji KWD 50 per bulan/setara dengan Rp. 2,3 juta dan bahkan dirinya tidak pernah menerima gaji selama 118 bulan senilai KWD 5.900/Rp. 259,6 juta).

Beberapa contoh kasus seperti tuduhan pencurian oleh pengguna jasa dan bahkan beberapa diantaranya diadili secara *in absentia* di pengadilan (contoh kasus Misni Bt Abubakar yang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara) sering kali terjadi karena pengguna jasa melakukan tuduhan pencurian kepada TKI yang melarikan diri dengan maksud untuk menghindari pembayaran gaji serta membuat TKI tersebut cenderung ilegal dan tidak mempunyai izin tinggal di mata hukum Kuwait. Sehingga membuat TKI tersebut terkena kasus hukum.

Setelah melakukan pendataan, dan melakukan pengecekan profil TKI Bermasalah, kemudian KBRI melakukan prosedur lanjutan seperti bagan berikut.

Bagan lanjutan penyelesaian permasalahan TKI bermasalah

Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
	Staf Lokal	Atnaker	Kepala Perwakilan	kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket
Menyusun daftar TKI yang tidak dapat diselesaikan dalam proses penanganan awal				Form pendataan	1 hari	Daftar TKI b Resume kasus	
Melakukan koordinasi dengan Pengacara KBRI				Form pendataan Resume kasus	1 hari	Rekomen dasi tidak lanjut penyelesai	

						an kasus	
Proses penyelesaian melalui <i>Dit Home Employment Ministry of Interior Kuwait</i>				Laporan kasus TKI B yang akan diselesaikan		Laporan kasus TKI B yang akan diselesaikan	
Membuat laporan ke kemplu RI, BNP2TKI dan Gubernur provinsi asal TKI				Form pendataan Resume kasus Rekomendasi Tidak lanjut Penyelesaian kasus	1 hari	TKIB kembali ke indonesia	

Pada proses kedua ini, KBRI melakukan penyaringan terhadap setiap kasus yang dialami TKI, dan membuat shortlist terkait kasus yang dapat ditangani dan tidak lanjut, bagi kasus yang tidak lanjut ini kemungkinan karena data yang dilampirkan kurang sesuai dan tidak lengkap, sehingga harus mengulang proses awal, bagi TKI dengan data yang lengkap akan lanjut ke proses akhir.

Selain proses seperti bagan diatas, KBRI Kuwait juga berhasil membentuk satuan penting, yaitu KBRI Kuwait telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Membentuk Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI serta menetapkan *standard of procedure* dan mekanisme penanganan kasus.
- Menyediakan *shelter* dan menampung para TKI bermasalah dengan memberikan pelayanan untuk kebutuhan sehari-hari.

- c. Melakukan pendekatan kepada otoritas terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Imigrasi dan bahkan Duta Besar RI melakukan pendekatan khusus dengan Wakil Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Kuwait.
- d. Pendampingan TKI di pengadilan dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Direktorat Tenaga Kerja
- e. Pencegahan pengiriman TKI pasca *moratorium*
- f. Kunjungan rutin ke rumah sakit, penjara, kepolisian dan pusat deportasi
- g. Fasilitasi pemulangan TKI sakit dan meninggal dunia.
- h. Memperjuangkan hak-hak TKI
- i. Menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum.

Setelah melakukan pengecekan data dan mengirimkan data ke kemenlu, maka proses akhir adalah seperti bagan berikut.

Bagan penyelesaian dan pemulangan TKI bermasalah

Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			
	Staf Lokal	Atnaker	Kepala Perwakilan	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket
Menyusun daftar TKI B yang sudah berada 1 bulan di transit house				Formulir Pendataan	1 hari	Data pengguna jasa tki yg tidak kooperatif	
Membuat surat pengantar untuk sidik jari ke <i>Dit Home Employment Kuwait</i> untuk dibuat <i>exit visa</i>				Formulir pendataan	1 hari	Surat pengantar proses Sidik jari	
Penerbitan SPLP				form			

oleh kepala perwakilan RI				pendataan Suat pengantar proses sidik jari	1 hari	SPLP	
Mengirinkam TKI B ke CID Tolha untuk Pemulangan				Formlir pendataan SPLP	1 hari	TKI B ke Indonesia	

Pada proses akhir ini, para TKI bermasalah harus tinggal kurang lebih 1 bulan di transit House KBRI, hal ini ditujukan agar proses litigasi berjalan dengan lancar, baik dari segi pendampingan dan konsultasi hukum, setelah itu, akan dikirimkan ke *Dit home Employment Kuwait* untuk melakukan proses sidik jari, dan mendapatkan surat pengantar, dan penerbitan SPLP, hingga akhirnya TKI bermasalah di deportasi kembali ke Indonesia. Ini adalah proses yang dilakukan oleh Indonesia karena belum adanya perjanjian notifikasi dengan Kuwait.

Indonesia belum pernah melakukan perjanjian ataupun persetujuan dengan Kuwait terkait *Notification Agreement*. Sejauh ini Indonesia dan Kuwait terlibat dalam 16 perjanjian, mayoritas merupakan perjanjian ekonomi, berikut adalah perjanjian antara Indonesia dan Kuwait, antara lain:

Table 12. Jumlah Perjanjian Indonesia dan Kuwait

NO	Judul Perjanjian	Tempat dan Tanggal Tanda Tangan
1.	Persetujuan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Dana Kuwait untuk	Kuwait - Minggu,

	Pembangunan Ekonomi Arab	10 April 1977
2.	Persetujuan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab untuk Proyek Jalan Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Kuwait - Rabu, 01 Agustus 1979
3.	Pertukaran Nota antara Duta Besar negara Kuwait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Jakarta - Kamis, 27 Desember 2001
4.	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait tentang Penempatan Tenaga Kerja	Jakarta - Kamis, 30 Mei 1996
5.	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral	Kuwait - Rabu, 23 April 1997
6.	Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait	Jakarta - Rabu, 30 Mei 2007
7.	Persetujuan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab untuk Proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek	Kuwait - Sabtu, 21 November 1981
8.	Persetujuan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab untuk Proyek Jalan Tol Padalarang – Cileunyi	Jakarta - Senin, 23 Maret 1987
9.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan dan Modal	Kuwait - Rabu, 23 April 1997
10.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik	Jakarta - Rabu, 30 Mei 2007
11.	Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Agama Republik Indonesia dan Jam'iyah Ihya' At-Turath Al-Islamy, Komite Asia Tenggara, Kuwait tentang Pengembangan Masyarakat	Jakarta - Selasa, 18 Agustus 2009
12.	Persetujuan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab untuk Proyek Pendistribusian Tenaga Listrik untuk Bandung	Kuwait - Selasa, 14 Juli 1981

13.	Memorandum Saling Pengertian mengenai Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait	Jakarta - Rabu, 30 Mei 2007
14.	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan	Jakarta - Rabu, 30 Mei 2007
15.	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Departemen Pertanian dan Pemerintah negara Kuwait diwakili oleh Kementerian Penguasa Umum, Pertanian dan Sumberdaya Perikanan mengenai Kerjasama Bidang Pertanian	Jakarta - Rabu, 30 Mei 2007
16.	Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara Kuwait	Kuwait - Senin, 28 Maret 1994

Sumber :Database Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
2018

Hingga saat ini, Indonesia tercatat hanya melakukan perjanjian *Notification Agreement* kepada dua negara saja, yaitu Brunei Darussalam dan Australia. Hal ini karena dibandingkan dengan Kuwait, Brunei Darussalam dan Australia merupakan salah satu negara dengan jumlah WNI dan TKI terbesar di dunia, tidak hanya untuk urusan ketenagakerjaan, namun lebih luas seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, hingga kewilayahan, sehingga dirasa perlu oleh pemerintah Indonesia untuk mengadakan perjanjian *notification agreement* dengan kedua negara tersebut. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 13. Perjanjian *Notification Agreement* Indonesia dengan negara Asing

No	Judul Perjanjian	Tempat dan tanggal Penandatanganan	Status Pemberlakuan
1	<p>Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Yang Dipertuan Agung Sultan dan Yang Dipertuan Brunei Darussalam mengenai Pemberitahuan Konsuler dan Bantuan Konsuler</p> <p><i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Consular Notification and Consular Assistance</i></p>	Bali, 18-Jul-2011	<p>Mulai Berlaku 18-Juli-2011 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 12)</p> <p>Masa Berlaku Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak (Pasal 12)</p> <p>Cara Pengakhiran Diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud (Pasal 12)</p>

2.	Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Notifikasi dan Bantuan Konsuler <i>Arrangement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia on Consular Notification and Assistance</i>	Canberra, 10-Mar-2010	<p>Mulai Berlaku 10-Maret-2010 (Tanggal Penandatanganan) (Bagian 16)</p> <p>Masa Berlaku Pengaturan ini akan tetap berlaku sampai Dihentikan oleh salah satu Pihak (Bagian 16)</p> <p>Cara Pengakhiran Dihentikan melalui Pemberitahuan secara tertulis enam bulan sebelumnya oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya melalui saluran-saluran diplomatik (Bagian 16)</p>
----	--	--------------------------	---

Sumber : *database* Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian International, 2018

Dengan tidak adanya perjanjian *Notification Agreement* tersebut, bukan berarti Indonesia kehilangan kewenangan atas warga negaranya, karena beberapa langkah telah ditempuh Indonesia dalam menyelamatkan warga negara di Kuwait dari tuntutan ataupun putusan hukum pengadilan Kuwait, yaitu dengan mendapatkan proses pengampunan (*Amnesty*) dari Amir/Pemerintah Kuwait:

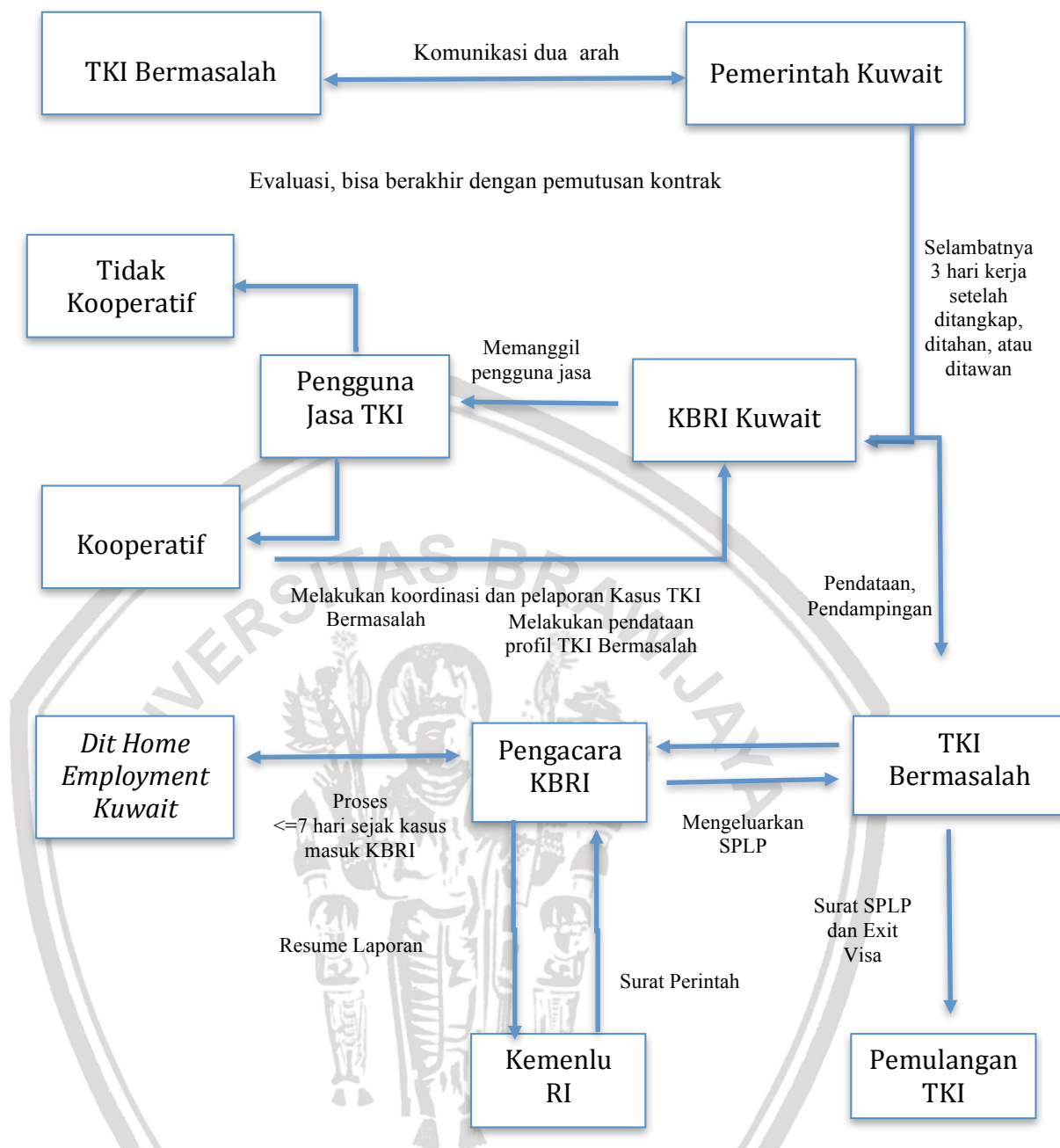
- a. KBRI akan memberikan pengajuan *Amnesty* kepada Amir/Pemerintah Kuwait melalui Menteri Dalam Negeri Kuwait untuk Warga negara Indonesia yang berada dalam tahanan
- b. Dewan Amiri akan menilai dan melaporkan kepada Amir bahwasanya apakah WNI tersebut layak untuk mendapatkan *Amnesty*. Umumnya dapat dilihat dari jenis hukuman, bentuk kejahatan maupun perilakunya di penjara ataupun dari adanya sertifikat perlakuan baik
- c. Kemudian Amir yang akan mengabulkan *Amnesty* tersebut⁵⁰

Umumnya *Amnesty* akan diberikan pada bulan Februari dikarenakan bulan tersebut adalah bulan kemerdekaan negara Kuwait dan rata-rata pada bulan Februari dapat mencapai 200 sampai dengan 250 pengajuan *Amnesty*.⁵¹ Hingga 2017 tercatat Indonesia berhasil mengupayakan hingga 50 *amnesty* setiap tahunnya, tergantung dari jenis kejahatan dan permasalahan yang ada.

Indonesia tentunya tidak saja harus bertahan dengan pemberian *amnesty* , namun harus segera melakukan perundingan dengan Kuwait untuk merumuskan perjanjian notifikasi, seperti halnya Brunei dan Australia, karena dengan notifikasi akan mempermudah proses deportasi ataupun penangkapan hingga penahanan TKI di luar negeri. Berikut adalah ilustrasi bagan jika Indonesia dan Kuwait melakukan perjanjian notifikasi.

⁵⁰Wawancara dengan Staf Fungsi Ketenagakerjaan pada hari Rabu, tanggal 20 July 2017

⁵¹Wawancara dengan Sekretaris Pertama Fungsi Politik Protokol Dan Konsuler KBRI Kuwait pada hari Rabu, tanggal 26 July 2017



Bagan diatas merupakan contoh skema dari perjanjian notifikasi jika Indonesia dan Kuwait sepakat untuk membentuk perjanjian notifikasi. Dengan isi dari perjanjiannya mencakup:

- a. Prinsip-prinsip dasar notifikasi konsuler dalam hal penangkapan, penahanan dan peradilan
 - 1) Apabila seorang warga negara dari negara pengirim ditangkap, ditahan, atau ditawan dalam wilayah konsuler

negara penerima, otoritas yang berwenang dari negara penerima akan menginformasikan kepada yang bersangkutan, tanpa penundaan, mengenai hak-hak dan pilihan-pilihan hukum, termasuk hak untuk menghubungi pos konsuler atau misi diplomatiknya; serta akan memfasilitasi komunikasi dengan pos konsuler atau misi diplomatiknya.

- 2) Para pihak akan menjamin, atas dasar resiprositas, bahwa warga negara dari negara pengirim yang ditangkap, ditahan, atau ditawan, akan diperlakukan dengan adil dan setara sesuai dengan undang-undang negara penerima
 - 3) Negara pengirim berhak untuk mendapatkan notifikasi bahwa seseorang warga negaranya telah ditangkap, ditahan, atau ditawan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara penerima.
- b. Notifikasi dan bantuan dalam hal penangkapan, penahanan, dan peradilan
- 1) Otoritas yang berwenang dari negara penerima akan memberitahukan pos konsuler atau misi diplomatik dari negara pengirim tanpa penundaan dan dalam waktu tiga hari kerja bahwa negara dari pengirim telah ditangkap, ditahan atau ditawan
 - 2) Informasi mengenai seorang warga negara yang telah ditangkap, ditahan atau ditawan di lokasi maupun di negara

penerima, akan disampaikan kepada pos konsuler atau misi diplomatik negara pengirim dengan persetujuan warga negara tersebut dan sesuai dengan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan-hubungan Konsuler serta undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima yang relevan. Jika orang tersebut tidak memberikan persetujuannya, negara penerima juga akan memberitahukan pos konsuler atau misi diplomatik secara tertulis mengenai hal ini, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima

- 3) Komunikasi apapun yang ditujukan kepada pos konsuler atau misi diplomatik oleh warga negara dari negara pengirim yang ditangkap, ditahan atau ditawan akan difasilitasi dan diteruskan tanpa penundaan oleh otoritas yang berwenang dari negara penerima pada pos konsuler atau misi diplomatik negara pengirim
- 4) Pejabat konsuler memiliki hak untuk berkunjung dan berkomunikasi dengan warga negaranya yang ditangkap, ditahan atau ditawan dan mengatur perwakilan hukum baginya atas dasar persetujuan yang bersangkutan. Otoritas yang berwenang dari negara penerima akan dengan segera membuat pengaturan kunjungan dari pos konsuler atau misi diplomatik terhadap warga negara tersebut. Jika orang tersebut tidak memberikan izinnya, negara penerima akan

memberitahukan pos konsuler atau misi diplomatik secara tertulis mengenai hal ini, berdasarkan pada undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima

- 5) Seorang warga negara yang ditangkap, ditahan atau ditawan akan berhak untuk menerima dan mengirim surat-surat dan korespondensi lainnya serta menerima barang-barang, obat-obatan, dan hal lain-lain untuk penggunaan pribadi dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari negara penerima
- 6) Otoritas yang berwenang dari negara penerima, atas dasar permintaan warga negara yang ditangkap atau ditahan, akan memberitahukan pejabat konsuler negara pengirim mengenai keadaan dan penyebab tuduhan-tuduhan terhadapnya, waktu, tanggal dan tempat yang ditetapkan untuk peradilan atau proses beracara lainnya. Seorang pejabat konsuler akan memiliki hak untuk menghadiri sidang atau proses beracara lainnya, apabila sidang tersebut terbuka untuk umum. Dalam hal persidangan bersifat tertutup, pejabat konsuler berhak untuk menghadiri sidang tersebut atas permintaan warga negara yang ditangkap atau ditahan, apabila peraturan persidangan memungkinkan

Berdasarkan bagan diatas maka proses yang pertama dimulai dengan adanya perjanjian antara Indonesia dengan Kuwait tentang perjanjian notifikasi. Yang kedua Setelah adanya perjanjian, apabila ada TKI

yang bermasalah yang kemudian ditangkap, ditahan atau ditawan oleh otoritas berwenang Kuwait maka otoritas berwenang tersebut akan menginformasikan kepada TKI yang bermasalah tersebut, tanpa adanya penundaan, mengenai hak-hak dan pilihan-pilihan hukum, termasuk hak untuk menghubungi pos konsuler atau misi diplomatik Indonesia; serta memfasilitasi komunikasi dengan perwakilan negara Indonesia. Yang ketiga apabila TKI bermasalah tersebut setelah diberi penjelasan lebih lanjut oleh otoritas berwenang dan setuju untuk menghubungi pos konsuler atau misi diplomatik Indonesia maka otoritas berwenang Kuwait akan memberitahukan pos konsuler atau misi diplomatik dari negara Indonesia tanpa adanya penundaan dalam waktu tiga hari kerja bahwa ada warga negara Indonesia telah ditangkap, ditahan atau ditawan. Namun apabila setelah otoritas berwenang tersebut menjelaskan kepada TKI bermasalah tersebut hak-hak dan pilihan-pilihan hukum yang dia miliki namun TKI bermasalah tersebut tidak memberikan persetujuannya untuk memberikan informasi mengenai dirinya telah ditangkap, ditahan atau ditawan kepada pos konsuler atau misi diplomatik negara Indonesia maka negara Kuwait akan memberitahukan pos konsuler atau misi diplomatik Indonesia secara tertulis mengenai hal ini, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima. Yang keempat KBRI Kuwait akan menghubungi pengguna jasa TKI untuk melakukan pendataan profil dari TKI bermasalah tersebut apabila pengguna jasa TKI tersebut tidak kooperatif maka KBRI Kuwait akan

memberikan evaluasi kepada pengguna jasa TKI tersebut dan bisa berujung pada pemutusan kontrak. Yang kelima setelah pengguna jasa TKI melakukan koordinasi dan pelaporan kasus TKI bermasalah maka KBRI Kuwait akan melakukan pendataan dan pendampingan dibidang hukum, seperti membantu memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan dipengadilan, menyiapkan ahli bahasa negara Kuwait, dan menyiapkan pengacara untuk mendampingi di pengadilan. Yang keenam KBRI Kuwait akan melakukan proses penyelesaian melalui *Dit Home Employment Ministry of Interior* Kuwait. Yang ketujuh KBRI Kuwait akan membuat laporan kepada Kemlu RI, Kemnakertrans, Kemeneg PPA, BNP2TKI dan Gubernur propinsi asal TKI. Yang kedelapan KBRI Kuwait akan membuat surat pengantar untuk proses sidik jari ke *Dit. Home Employment* Kuwait untuk dibuatkan *Exit Visa*. Yang kesembilan Kepala perwakilan RI di Kuwait akan menerbitkan SPLP untuk proses pemulangan TKI tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data dari KBRI Kuwait masih terdapat kasus perlakuan tidak manusiawi dari pengguna jasa seperti contoh kasus penganiayaan yang bahkan diantaranya menimbulkan korban jiwa. KBRI di Kuwait telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI antara lain dengan menyediakan penampungan, memberikan advokasi dan menunjuk pengacara. Namun penanganan dari KBRI Kuwait tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan otoritas berwenang Kuwait tidak memberikan notifikasi kepada KBRI Kuwait, hak dari TKI ini akan rentan sehingga dapat merugikan TKI tersebut karena tidak adanya pendampingan di bidang hukum. Oleh karena itu urgensi dari notifikasi adalah untuk menjamin hak-hak dari warga negara Indonesia yang sedang berada di Kuwait dapat terpenuhi terkhusus dalam bidang hukum.
2. Model optimalisasi dari notifikasi dapat dilakukan dengan diawali pembuatan perjanjian notifikasi antara Indonesia dan Kuwait, hal ini didasari untuk menanggulangi kekurangan dari pasal 36 Konvensi Wina 1963 yakni notifikasi dapat diberikan kepada pejabat konsular oleh otoritas berwenang negara penerima tanpa adanya penundaaan apabila negara pengirim ataupun TKI yang terkena kasus hukum memintanya terlebih dahulu, maka perlu adanya perjanjian dengan isi dari perjanjian

itu mengharuskan otoritas yang berwenang negara Kuwait untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan negara Indonesia dalam waktu tiga hari kerja bahwa ada warga negara Indonesia yang telah ditangkap, ditahan atau ditawan. dan diikuti proses berikutnya sampai kepada proses pemulangan TKI

B. SARAN

1. Baik Konvensi Wina 1961, maupun Konvensi Wina 1963, belum menetapkan informasi detail terkait *notification*, seperti jangka waktu notifikasi setelah adanya penangkapan, sehingga dalam pelaksanaannya hanya didasarkan atas dasar kesepakatan antar negara, sehingga tidak ada hak dan kewajiban para pihak yang rigid. Maka dari itu perlu adanya *notification agreement*. Pembentukan perjanjian ini menjadi lebih penting karena beberapa kasus yang terjadi di Kuwait keseluruhannya tidak adanya pemberitahuan kepada KBRI Kuwait sehingga apabila perjanjian ini dibuat upaya perlindungan TKI akan lebih optimal.
2. Model optimalisasi dari notifikasi adalah perlunya diawali perjanjian antara Indonesia dan Kuwait terkait perjanjian notifikasi agar adanya kepastian pemberitahuan oleh otoritas berwenang Kuwait kepada perwakilan Indonesia ataupun kepada TKI tersebut sejak adanya penangkapan atau penahanan TKI. Notifikasi akan lebih efisien dan lancar jika adanya kepastian waktu, maka dari itu Indonesia perlu melakukan pendekatan lebih intensif kepada kepala negara Kuwait sehingga dapat teralisasikannya perjanjian notifikasi antara Indonesia dan Kuwait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisikin, Zainal dan Amirudin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin. **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM**, Jakarta, Grasindo, 2005
- Bambang Sunggono, Bambang. **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, London : Sweet and Maxwell, 5th Ed, 1998
- Effendi, Masyur. **Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas hukum Diplomatik dalam era ketergantungan antar Bangsa Usaha Nasional**, Surabaya, 1993.
- Glahn, Gerhard von dan James Larry Taulbee. *Law Among Nation : An Introduction to Public International Law*, Routledge, New York, 2011.
- Gustina, Amelya. *The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia and Other Foreign States*, Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2, Juni 2014.
- Hartono, Sunaryati. **Politik Hukum menuju satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.
- HS, salim dan Erlies Septiana Nurbani. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Hingorani, *Modern International Law*, 2nd Ed, 1984.

John Quigley, William J. Aceves, and Adele Shank, *The Law of Consular*

Access: A Documentary Guide, Routledge, New York, 2009

Kansil, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Mauna, Boer. **Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, PT. Alumni, Bandung, 2003

Masyur Effendi, **Hukum Konsuler Hukum Diplomatik** serta Hak dan Kewajiban Wakil - Wakil Organisasi Internasional/Negara, IKIP Malang, Malang, 1994

Mezak, Meray Hendrik. **Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**, Universitas Pelita Harapan Vol. V No. 3, Jakarta, 2006.

Rosalyn Higgins, *Problems and Proses, : International LA and How We Use it*, Oxford: Clarendon Press. 1997.

Setyo Widago, **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, Bayumedia, Malang, 2008

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 2012.

Suryokusumo, Sumaryo. **Hukum Diplomatik dan Konsuler**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2013.

Widodo, **Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi**, Laks Bang Justitia, Surabaya, 2009.

Waluyo, Bambang. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Konvensi Wina 1961

Konvensi Wina 1963

JURNAL

Made Maharta Yasa, “***Block Book Hukum Diplomatik***” (*Online*), Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008.

Sub Committee of League of Nations Committee of Experts for the Progressive Codification of International Law 1926.

Melda Kamil Ariadno dan Iman Rizani, “***Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals***”, (*Online*), Jurnal Hukum Internasional Volume 3, 2006.

INTERNET

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (*Online*)

<http://www.bnp2tki.go.id/>

Advancing The Right of Migrant Workers Throughout The Middle East, (*Online*)

<https://www.migrant-rights.org/>

Aljazeera News, (*Online*), <http://www.aljazeera.com/>

Tabloid Diplomasi, (*Online*), <http://www.tabloiddiplomasi.org/>

Tabloid Merdeka, (*Online*), <http://www.merdeka.com/>

United Nations, (*Online*), <http://legal.un.org/>



LAMPIRAN

Duta Besar Bersama Dengan *Home Staff* Dan *Local Staff* di depan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait



Kondisi Shelter di KBRI





Ruangan Kekonsuleran/ Tempat Pelayanan Masyarakat di KBRI



**Duta Besar Bersama Tenaga Kerja Indonesia Sedang Konsultasi
Dengan Pengacara**



Duta Besar Indonesia Sedang Berbincang Dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kerja Informal Kuwait



Suasana Penjara Pusat Di Kuwait Yang Berada Di Alamat Khalaf Al Ahmar Rd



Penulis di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait





Penulis Bersama Duta Besar LBBP RI di Kuwait

